

The 4th MIKTA Speakers' Consultation

Catatan Pertemuan

Pendahuluan

MIKTA merupakan forum konsultatif yang terdiri dari lima negara *middle power*, yaitu Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia yang memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi dan anggota G-20.

MIKTA bertemu pertama kali di Forum Sidang Umum PBB ke-68 pada 17 Oktober 2013. Forum informal nonstruktural ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan internasional sekaligus menjembatani kepentingan *least-developed countries* dengan negara-negara maju.

The 4th MIKTA Speakers' Consultation dilaksanakan pada 15–17 September 2018, di Ubud dan Istana Tampaksiring, Bali, Indonesia, dengan tema “*Creating Peace And Prosperity: The Role Of Parliament*”

Agenda *The 4th MIKTA Speakers' Consultation* adalah:

- i) *Creative Industries to Support Inclusive Economic Growth*
- ii) *Maintaining Peace and Security: Empowering the UN*
- iii) *The Role of Women in Peace and Security*
- iv) *Maritime Cooperation for Sustainable Growth and Prosperity*

Peserta

The 4th MIKTA Speakers' Consultation diikuti oleh empat pimpinan parlemen negara MIKTA, yaitu:

- i) Yang Mulia **Mr. Bambang Soesatyo**, Ketua DPR RI
- ii) Yang Mulia **Mr. Moon Hee-Sang**, Ketua Majelis Nasional Republik Korea
- iii) Yang Mulia **Mr. Mustafa Şentop**, Wakil Ketua Parlemen Turki
- iv) Yang Mulia **Ms. Sue Lines**, Wakil Presiden Senat Australia

Dikarenakan wakil pimpinan Parlemen Meksiko berhalangan hadir, maka Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, **Mr. Armando Gonzalo Alvarez Reina** mewakili Parlemen Meksiko.

Courtesy Calls

Rangkaian *Courtesy Call* dengan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dilaksanakan di Ixora Room, Padma Ubud - Bali, Indonesia mulai pukul 14:00 sampai dengan 15:30 dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Wakil Ketua Parlemen Turki, dan Wakil Presiden Senat Australia.



Courtesy Call dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea



1. Pengantar Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Pada pukul 14:00, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo bertemu dengan **Mr. Moon Hee Sang**, Ketua Majelis Nasional Republik Korea. Dalam pengantarnya, Ketua DPR RI menyampaikan selamat atas terpilihnya Mr. Moon Hee Sang untuk mengemban tugas sebagai Ketua Majelis Nasional Republik Korea.

Tahun ini hubungan bilateral Indonesia–Republik Korea telah berjalan selama 45 tahun. Hubungan yang baik antara kedua negara ditandai dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Republik Korea baru-baru ini sebagai kunjungan balasan Presiden Moon Jae-in ke Indonesia tahun lalu.

Kedua negara telah menjalin kerja sama kemitraan strategis pada 2006 dengan ditandatanganinya *“Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea”*. Kemitraan tersebut kemudian ditingkatkan menjadi *special strategic partnership* di tahun 2017 dengan penajaman akselerasi industrialisasi di Indonesia.

Republik Korea merupakan negara mitra ekonomi penting bagi Indonesia, sebagai penanam investasi dan acuan sumber teknologi khususnya di bidang *heavy industry*, IT, dan telekomunikasi. Di lain pihak, Indonesia menawarkan peluang pasar yang sangat besar, sumber daya alam, dan tenaga kerja.

Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama ketenagakerjaan *G to G* antara kedua negara yang selama ini telah berjalan baik. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional. Ke depan DPR RI berharap kerja sama tenaga kerja ini semakin baik dengan penambahan kuota untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terkait bidang ekonomi, kedua negara juga telah menandatangani *MoU* kerja sama di bidang industri kreatif di tahun 2013, dan ditindaklanjuti dengan dibukanya *Korean Creative Content Agency* di Jakarta pada Oktober 2016. DPR RI berharap kerja sama di bidang industri kreatif antara pemerintah Indonesia dan Republik Korea dapat lebih meningkat lagi terutama di bidang seni, kerajinan, musik, film, dan *video games*.

Indonesia mendukung penuh upaya perdamaian dan bebas nuklir di Semenanjung Korea. Indonesia juga berkepentingan terhadap perdamaian, stabilitas, keamanan kawasan Asia sebagai prasyarat keberlanjutan proses pembangunan nasional.

2. Pengantar Ketua Majelis Nasional Republik Korea (Mr. Moon Hee-Sang)

Ketua Majelis Nasional Republik Korea mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan sambutan yang hangat yang telah disampaikan. Beliau telah empat kali ke Indonesia termasuk ke Bali dan Jakarta. Setiap berkunjung ke Indonesia, Beliau selalu merasa ada yang baru. Dan pada kunjungan ke Bali kali ini, Beliau merasa bahwa Bali benar-benar merupakan pulau dewata dan karunia dari Tuhan.

Tidak lupa Ketua Majelis Nasional Republik Korea mengucapkan selamat atas suksesnya *Asian Games* Jakarta - Palembang 2018 kemarin dan selamat untuk prestasi Indonesia. Khususnya Beliau mengucapkan selamat karena peraih medali emas pertama Indonesia berasal dari cabang olahraga taekwondo putri dengan pelatih yang berasal dari Republik Korea. Dalam taekwondo, *poomsae* merupakan cabang olahraga yang sangat sulit dan dapat dikatakan sebuah kesenian. Seharusnya medali emas tersebut diraih oleh atlet Republik Korea, tetapi justru diraih oleh atlet Indonesia. Tetapi Beliau tetap senang akan capaian tersebut. Selanjutnya di cabang olahraga sepak bola, Republik Korea meraih peringkat pertama di final, dan seluruh warga Asia senang melihatnya.

Selain itu, pada upacara penutupan kemarin, Ketua Majelis Nasional Republik Korea juga menyaksikan pertunjukan dari penyanyi Republik Korea *Super Junior* dan kesempatan tersebut memunculkan rasa haru di hati seluruh rakyat Republik Korea.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea juga memperkenalkan sebuah acara TV yang sangat terkenal di Republik Korea yang berjudul *Youn's Kitchen* atau Dapur Keluarga Youn yang pengambilan gambarnya dilakukan di pulau Lombok. Acara ini sangat terkenal di Republik Korea, dan salah satu tokoh utamanya adalah Youn Yuh-jung artis sangat legendaris di Republik Korea.

Satu persatu, Ketua Majelis Nasional Republik Korea memperkenalkan delegasi yang ada di ruangan. Mulai dari Anggota parlemen yang memiliki istri sangat legendaris, mantan artis. Mr. Ji Sang Wuk menikah dengan mantan artis Republik Korea dan juga merupakan idola Ketua Majelis Nasional Republik Korea ketika masih muda. Bapak Ji Sang Wuk adalah anggota parlemen dari Partai Bareunmirae dan beliau berada di komisi kebijakan di partainya. Beliau adalah tokoh penting ketiga, yang merupakan calon presiden di masa depan.

Bapak yang di sebelah Ketua Majelis Nasional Republik Korea berasal dari partai berkuasa di Republik Korea, Partai The Minjoo, dan beliau berada di komisi urusan luar negeri dan unifikasi. Karena itu beliau dinilai sebagai pakar isu Semenanjung Korea. Kedudukan beliau di Republik Korea setingkat Menteri Luar Negeri.

Selanjutnya dua bapak yang hadir di ruangan adalah tokoh yang sangat penting bagi Ketua Majelis Nasional Republik Korea karena beliau adalah penasehat bidang politik dan kebijakan untuk Ketua Parlemen. Mereka juru bicara Ketua Majelis Nasional Republik Korea. Sementara bapak yang di tengah, Bapak Duta Besar Khusus yang ditugaskan dari Kementerian Luar Negeri untuk Ketua Majelis Nasional Republik Korea dan direktur urusan internasional.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea juga ingin menyampaikan rasa duka cita atas bencana alam di Lombok kemarin. Pada saat kejadian, seluruh masyarakat Republik Korea turut berduka dan telah menyampaikan bantuan kepada Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPR RI, Republik Korea dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973. Selama 45 tahun kerja sama yang erat

telah dilakukan di berbagai bidang. Pemerintahan baru Republik Korea yang dipimpin Presiden Moon sangat mementingkan masyarakat dan juga ingin membangun sebuah komunitas penuh damai demi kesejahteraan rakyat. Beliau juga mencanangkan sebuah kebijakan yang bernama New Southern Policy dan di bawah kebijakan ini Republik Korea sangat mementingkan hubungan yang erat antara Republik Korea dan ASEAN, dan Indonesia adalah negara yang paling penting di ASEAN.

Sejak pelantikan Presiden Moon, beliau memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi di antara negara-negara ASEAN. Pada saat kunjungan kenegaraan beliau November tahun lalu, kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan hubungan kemitraan strategis menjadi hubungan kemitraan strategis khusus. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea. Semua ini menunjukkan bukti bahwa hubungan kedua negara semakin erat.

Sebelum Ketua Majelis Nasional Republik Korea berkunjung ke Indonesia, satu setengah tahun yang lalu, Ketua Majelis Nasional Republik Korea sebelum-nya juga berkunjung ke Indonesia. Dua kali kunjungan Ketua Majelis Nasional Republik Korea ke Indonesia dalam kurun waktu satu setengah tahun merupakan pertama kalinya dalam sejarah kedua negara.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea juga sangat mendukung dan sangat senang melihat adanya kesempatan untuk bisa bertemu lebih banyak melalui berbagai konferensi seperti Pertemuan MIKTA antar-ketua parlemen dan juga pertemuan Eurasia yang akan diselenggarakan di Turki.

Perdagangan dan investasi antara kedua negara semakin tinggi, buktinya adalah jumlah investasi yang dilakukan Republik Korea terhadap Indonesia meningkat 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga jumlah perdagangan antara kedua negara meningkat sebanyak 20 persen. Oleh karena itu Ketua Majelis Nasional Republik Korea mohon dukungan dan perhatian besar dari Ketua DPR RI agar perusahaan Republik Korea seperti Hyundai, Posco atau Lotte Chemical bisa beroperasi dengan lancar di Indonesia.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea pernah menjabat sebagai kepala staf presiden No Moo-hyun dan pada saat itu mereka menggunakan empat unit helikopter asal Indonesia. Beliau berharap kerja sama di bidang industri dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi seperti kerja sama pengembangan pesawat tempur, kapal selam, dan juga alutsista canggih lainnya.

Sepengetahuan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, jumlah pertukaran antar-masyarakat Indonesia dan Republik Korea sebanyak 580 ribu orang setiap tahun. Tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR RI bahwa ada harapan agar PMI di Republik Korea mendapat perhatian dan ditingkatkan kuota-nya. PMI sangat dihargai di Republik Korea dan mendapatkan apresiasi karena terkenal rajin dan disiplin. Ketua Majelis Nasional Republik Korea baru-baru ini menonton sebuah acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi pendidikan (EBS) yang jika diterjemahkan berjudul “Pergi Jauh Mencari Ayah”. Ketika menonton acara tersebut, Ketua Majelis Nasional Republik Korea turut menangis karena ayah tersebut berasal dari Indonesia dan putera-puteri dan sang istri berkunjung ke Republik Korea untuk bertemu dengan ayahnya. Pemerintah Republik Korea berjanji selain berusaha untuk meningkatkan kuota PMI juga akan berupaya terus untuk melindungi hak asasi manusia dari para PMI.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea juga mengapresiasi upaya Indonesia dalam meningkatkan kerja sama selama lima tahun sejak MIKTA dibentuk sebagai forum kerja sama antara negara berkekuatan menengah di tahun 2013. Khusus konferensi MIKTA antarketua parlemen ini sudah keempat kali dilaksanakan dan Beliau melihat banyak perkembangan dan ini bisa diraih bersama-sama karena Indonesia turut berperan.

3. Penutup

Selanjutnya, Ketua DPR RI menyampaikan tanggapan terkait investasi mobil Hyundai. Indonesia justru menunggu investasi yang lebih besar lagi dari Hyundai di Indonesia. Hyundai pernah menjadi kendaraan utama Indonesia, tetapi beberapa waktu kemudian menghilang dari pasaran dan Beliau mendengar kabar Republik Korea akan melakukan investasi besar-besaran lagi dan tentunya disambut dengan baik.

Ketua DPR RI juga menyambut baik kerja sama untuk pesawat tempur. dan Ketua DPR RI berharap kerja sama tersebut dapat segera direalisasikan dan dikembangkan. Ketua DPR RI sudah pernah mencoba kapal selam buatan Republik Korea milik TNI AL dan masih ada beberapa lagi yang sedang dalam pembuatan. Ketua DPR RI berharap ada *transfer of knowledge* antara dua negara atas pembuatan kapal selam.



1. Pengantar Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Pertemuan dengan **Mr. Mustafa Sentop**, Wakil Ketua Parlemen Turki dimulai pada pukul 14:30. Pada kesempatan pertama, Ketua DPR RI menyampaikan rasa hormat karena pertemuan kali ini memiliki arti penting bagi peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Turki yang telah terjalin sejak 1950. Ketua DPR RI percaya bahwa kunjungan yang mulia beserta delegasi dalam kerangka *MIKTA Speakers' Consultation* dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

Ketua DPR RI juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Mr. Mustafa Sentop sebagai Wakil Ketua Parlemen Turki. Diharapkan hubungan bilateral Indonesia dan Turki akan semakin erat dalam menghadapi tantangan global.

DPR RI mengapresiasi peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang ditandai dengan kerja sama bilateral di berbagai bidang serta kunjungan antarpimpinan baik antarpemerintah dan parlemen hingga antarmasyarakat. Ketua DPR RI sangat optimis bahwa hubungan kedua negara dapat menguat di masa yang akan datang terutama melalui hubungan antarparlemen.

Kedua parlemen telah bekerja sama dengan baik selama ini di berbagai forum internasional seperti IPU, APA, dan PUIC terutama konsistensi kedua parlemen dalam memperjuangkan isu Palestina dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Ketua DPR RI mengharapkan kerja sama kedua parlemen di forum internasional tersebut dapat ditingkatkan di masa yang akan datang serta mendukung upaya *United Nations Relief and Works Agency* (UNWRA) dalam membantu pengungsi Palestina.

Indonesia dan Turki merupakan dua negara muslim besar dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Keduanya merupakan *focal point* dalam mempromosikan nilai-nilai Islam moderat dan sekaligus sinergi dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme.

Di bidang pertahanan, Indonesia memandang Turki sebagai mitra penting dan strategis. Ketua DPR RI mencatat adanya kerja sama pengembangan industri melalui PT. Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industries, serta kerja sama PT. Pindad dengan FMC Nurol Savunma Sanayii Turki pada tahun 2016 patut diapresiasi sebagai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini Ketua DPR RI berharap Indonesia dan Turki dapat bekerja sama dengan baik untuk menangkal ancaman dan intervensi asing yang mencoba membatasi kebebasan kita untuk menentukan sikap sebagai negara yang berdaulat.

Di bidang ekonomi, volume perdagangan bilateral Indonesia–Turki mengalami peningkatan dari USD1,3 juta pada tahun 2016 menjadi USD1,7 juta pada tahun 2017 berdasarkan data Kementerian Perdagangan. Ketua DPR RI berharap peningkatan tersebut dapat terus ditingkatkan dan berlanjut mencapai target volume perdagangan bilateral Indonesia–Turki sebesar USD5 miliar pada tahun 2023. Oleh karena itu, Ketua DPR RI berharap perundingan *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT CEPA) kiranya dapat diselesaikan bersama.

Kedua negara paham bahwa Indonesia dan Turki memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi Islam, terutama dalam berbagai pembiayaan yang ada. Ketua DPR RI berharap perhatian tersebut dapat mendorong kerja sama yang baik bagi Indonesia dan Turki dalam hal pengembangan ekonomi Islam.

DPR RI mengapresiasi partisipasi aktif parlemen Turki pada MIKTA sebagai upaya strategis memberikan solusi inovatif terhadap isu-isu global masa kini dan mempererat hubungan kedua negara. Ketua DPR RI berharap Turki dapat terus mendukung keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2018.

2. Pengantar Wakil Ketua Parlemen Turki (Yang Mulia Mr. Mustafa Şentop)

Pertama-tama, Wakil Ketua Parlemen Turki menyampaikan salam dari Ketua Parlemen Turki yang berhalangan hadir dalam pertemuan MIKTA kali ini. Disampaikan juga bahwa sebelum datang ke pertemuan ini, Wakil Ketua Parlemen Turki telah bertemu dengan Presiden Turki yang meminta untuk menyampaikan salam Beliau kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Parlemen Turki selanjutnya memperkenalkan Anggota Delegasi, mulai dari: Hon. Mr. Erhan Usta, Anggota dari Partai Pergerakan Nasionalis, Wakil Pimpinan Kelompok Partai; Hon. Mr. Mustafa Elitas, Anggota Komisi Industri, Perdagangan, Energi, Sumber Daya Alam, Informasi dan Teknologi; Mr. Gokmen Toplu, Wakil Ketua Hubungan International Parlemen Turki; dan Mr. Burak Ali Karacan, Duta Besar Turki.

Wakil Ketua Parlemen Turki juga menyampaikan duka mendalam atas peristiwa gempa bumi berturut-turut yang terjadi di Pulau Lombok. Beliau mengharapkan situasi di Lombok segera pulih.

Indonesia adalah negara keempat terbesar berdasarkan jumlah penduduk, negara demokrasi Muslim terbesar, dan merupakan ekonomi terbesar keenam belas di dunia.

Turki menganggap Indonesia sebagai mitra penting, strategis, dan dapat diandalkan di kawasan. Ekonomi Islam merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian Turki yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama sistem ekonomi global serta kontraterorisme.

Berakar pada sejarah, hubungan kedua negara didasarkan pada solidaritas, persahabatan, dan kerja sama yang cukup baik. Ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Turki pada Juli lalu, kunjungan tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam jalinan hubungan bilateral kedua negara. Perjanjian yang ditandatangani selama kunjungan serta tawaran kerja sama dengan swasta telah meningkatkan konteks hubungan kedua negara.

Hubungan politik kedua negara terus membaik seiring dengan waktu. Untuk kerja sama di masa depan, Wakil Ketua Parlemen Turki beranggapan bahwa kerja sama di bidang pendidikan menjadi bidang penting untuk dipertimbangkan. Sejak 1992 Turki menawarkan beasiswa dan saat ini sudah mencapai 810 pelajar Indonesia. Tahun lalu, jumlah pelajar Indonesia dengan beasiswa Turki berjumlah 90 pelajar.

Diinformasikan juga bahwa Turki akan menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan parlemen negara-negara Eurasia di Antalya dari 8 hingga 11 Oktober 2018. Forum ini akan menjadi ajang tertinggi yang sangat penting bagi Turki di mana paling tidak akan datang lebih dari 50 ketua dan wakil ketua parlemen berbagai negara untuk menghadiri forum tersebut. Sebelumnya, Ketua Parlemen Turki Mr. İsmail Kahraman telah berkunjung ke Indonesia di bulan Mei 2016. Turki juga telah menerima Mr. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI pada September 2017, dan juga Mr. Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI yang tahun lalu sempat berkunjung ke Parlemen Turki.

Wakil Ketua Parlemen Turki mengharapkan kesuksesan dan keberhasilan dari pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan Indonesia di tahun 2019 mendatang. Beliau berharap demokrasi di Indonesia terus meningkat seiring dengan keberhasilan pemilihan legislatif.

Turki telah mendeteksi 11 sekolah yang berafiliasi dengan organisasi teroris. Organisasi-organisasi ini menyamar masuk di bidang pendidikan. Keberadaannya mengancam keamanan banyak negara termasuk Indonesia. Bahkan gedung parlemen pun diancam untuk dibom. Wakil Ketua Parlemen Turki memahami bahwa Indonesia telah mengambil langkah penting untuk melawan organisasi terorisme sampai ke akar-akarnya, dan untuk itu Turki berterima kasih. Saat ini telah ada yayasan yang mengambil alih sekolah yang bermasalah di berbagai negara dan membangun hubungan bilateral yang positif antara negara-negara tersebut dengan Turki. Selain itu, yang menjadi perhatian Turki adalah siswa di sekolah-sekolah tersebut yang tidak boleh menjadi korban dari upaya besar melawan terorisme.

Turki dan Indonesia sering kali memiliki cara pandang yang sama dalam banyak hal terkait agenda internasional. Kedua negara memiliki kerja sama yang erat dalam banyak organisasi multilateral seperti PBB, G-20, OIC, D-8, dan MIKTA. Wakil Ketua Parlemen Turki menyadari sering terjadinya persamaan pendapat di semua platform multilateral. Oleh karena itu, Beliau merasa kerja sama kedua negara perlu diintensifkan untuk isu-isu global seperti antiterorisme, perkembangan peradaban, serta isu yang berkaitan dengan Timur Tengah dan masa depan ekonomi global. Sebagai negara muslim yang demokratis, kekuatan politik kedua negara perlu dibangun bersama dalam nuansa solidaritas dan berbagi pengalaman.

Kerjasama juga perlu ditingkatkan dalam kerangka ASEAN. Peran Indonesia yang penting dalam ASEAN dan menjadi rumah dari Sekretariat ASEAN merupakan fakta penting bagi Turki. Selain itu, Turki sangat menghargai dukungan Indonesia yang menyertakan Turki sebagai mitra dialog ASEAN.

Sedangkan untuk korban yang berjatuh dari warga sipil Palestina oleh Israel dan reaksi Indonesia terhadap aksi ini menunjukkan kepada dunia bahwa saudara muslim kita di Palestina tidak sendirian. Walaupun ada negara-negara yang tidak peduli dengan upaya yang dilakukan Indonesia, terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk 2019–2020 akan menjadi kontribusi yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi di Palestina.

Beralih ke kerjasama dalam wadah OIC, Turki menyayangkan kesulitan yang dihadapi negara tertentu untuk ikut dalam KTT Luar Biasa OIC untuk Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada 6 dan 7 Maret 2016 di Jakarta. Delegasi tetap kesulitan untuk masuk Indonesia walaupun telah menerima surat undangan resmi dari Sekretaris OIC. Turki berharap Indonesia pada saat itu dapat mengambil pendekatan yang lebih konstruktif dan sejalan dengan peraturan dan praktik OIC.

Turki cukup senang menyaksikan perkembangan ekonomi Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam, stabilitas ekonomi, dan dinamika hubungan kedua negara. Wakil Ketua Parlemen Turki percaya bahwa keberhasilan ekonomi ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Perkembangan hubungan dagang kedua negara juga menggembirakan. Seperti tadi dikatakan, di tahun 2017 volume perdagangan bilateral mencapai USD1,7 juta. Tetapi neraca perdagangan masih lebih menguntungkan Indonesia. Oleh karena itu, target utama Turki adalah melampaui level USD5 juta dalam waktu dekat.

Keterlibatan sektor swasta tentunya akan memperkuat hubungan kedua negara. Wakil Ketua Parlemen Turki meyakini bahwa kerjasama ekonomi akan meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah Turki yang diwakili oleh Recep Akdağ, Wakil Perdana Menteri pada waktu itu yang menghadiri Rapat Komisi Ekonomi Bersama pada 11 Oktober 2017 di Jakarta. Sejak saat itu beragam kerjasama ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan pariwisata terus dibahas kedua negara. Pengembangan infrastruktur yang dikerjakan Turki tidak hanya untuk proyek di Asia Tengah, tetapi juga di Afrika. Semoga kerjasama di bidang pengembangan infrastruktur di Indonesia akan dapat direalisasikan dengan segera.

Penerbangan Turkish Airlines sangat penting dalam memperkuat kerjasama perdagangan. Parlemen Turki mengharapkan ada peningkatan jumlah penerbangan dari Istanbul ke Jakarta. Satu masalah yang masih dihadapi Turkish Airlines adalah permasalahan imigrasi dan penundaan penerbangan yang terkadang lama.

Hal terakhir yang disampaikan Wakil Ketua Parlemen Turki adalah permasalahan di Rohingya. Sejak 25 Agustus 2017 pasukan keamanan di Myanmar telah melakukan kekerasan sistematis dan tidak proporsional pada warga Rohingya. Sekitar 700.000 orang Rohingya harus menjadi pengungsi di Bangladesh, dan tentunya sulit mendapatkan rasa aman sampai mereka kembali dengan selamat, dengan sukarela, dan dengan bermartabat ke rumahnya di Myanmar. Masyarakat internasional harus bertindak cepat untuk mencari solusi tepat dalam menghadapi krisis ini. Sehubungan dengan bantuan kemanusiaan, Turki tetap akan memberikan dukungan sampai bantuan kemanusiaan dapat menjangkau wilayah tersebut.

3. Penutup

Ketua DPR RI menyampaikan keinginan untuk hadir dalam pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan Ketua Parlemen Eurasia di Turki. Selanjutnya Ketua DPR RI juga meyakinkan Wakil Ketua Parlemen Turki untuk tidak perlu khawatir mengenai terorisme. Indonesia saat ini sudah punya Undang-Undang Anti-terorisme dan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia.



1. Pengantar Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Pertemuan dengan Wakil Presiden Senat Australia, **Senator Sue Lines**, dimulai pada pukul 14:30. Dalam pertemuan tersebut Ketua DPR RI menginformasikan bahwa DPR RI telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Australia dan telah melakukan kunjungan persahabatan di tahun 2017.

Australia, selain negara tetangga, juga adalah mitra strategis Indonesia. Ketua DPR RI percaya bahwa kedua negara akan selalu mengedepankan kepentingan bersama dalam membangun kerja sama bilateral. Beliau akan selalu mendukung upaya penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Australia. Beliau juga mendukung penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam bidang keamanan maritim, penanggulangan terorisme, dan berbagai bidang kerja sama lainnya.

DPR RI juga mengapresiasi kerja sama kedua negara yang telah memprakarsai pertemuan "*Bali Process Ministerial and Business Forum 2018*", yang diselenggarakan di Bali pada bulan Agustus lalu, yang memberi perhatian pada pengentasan perdagangan orang dan perbudakan modern.

2. Pengantar Wakil Presiden Senat Australia (Yang Mulia Ms. Sue Lines)

Wakil Presiden Senat Australia menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan dirinya dan wakil dari Kedutaan Australia di Bali. Wakil Presiden Senat Australia adalah Senator dari Western Australia dan saat ini diberi kepercayaan sebagai Wakil Presiden Senat Australia. Seperti biasa, sebagai orang Australia, Ibu Wakil Presiden Senat Australia sudah sering kali ke Bali untuk berlibur, selain juga berkunjung ke Jawa dan Lombok. Begitu juga dengan sebagian besar orang Indonesia yang sering berkunjung ke Australia. Penerbangan dari Perth ke Denpasar lebih singkat dari penerbangan Perth ke Canberra.

Beberapa bulan yang lalu, sebagai bagian dari Grup Kerja Sama Bilateral, beberapa Anggota DPR RI telah mengunjungi Parlemen di Canberra. Ibu Wakil Presiden Senat Australia sudah menantikan untuk mengikuti pertemuan MIKTA dan meyakini bahwa hubungan bilateral antara Indonesia-Australia sangat penting bagi Australia. Ada keyakinan bahwa bersama-sama, kedua negara dapat memainkan peran penting di kawasan untuk memajukan perdamaian dan kerja sama. Ada banyak kesamaan di antara

kedua negara, dan Indonesia merupakan salah satu negara tetangga terdekat Australia. Wakil Presiden Senat Australia menantikan diskusi dengan delegasi DPR dan anggota MIKTA lainnya dalam dua hari mendatang.

Opening Session

Pembukaan *The 4th MIKTA Speakers' Consultation* dilaksanakan pukul 10:00 di Istana Tampaksiring, Bali, pada 16 September 2018.

Dalam sambutannya, Ketua DPR RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran para Pimpinan Parlemen Negara Anggota pada pertemuan ke-empat negara anggota MIKTA dari unsur Parlemen ini. Diinformasikan bahwa Parlemen Meksiko mewakilkan kepada Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Yang Mulia Mr. Armando Gonzalo Alvarez untuk hadir dan memantau jalannya pertemuan kita hari ini.

Ketua DPR RI menyampaikan bahwa Istana Tampaksiring dibangun atas prakarsa Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno dan merupakan satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah Indonesia merdeka.

Beliau kemudian menekankan bahwa MIKTA hadir di saat dunia berubah dengan cepat. Isu-isu global baru terus bermunculan, termasuk di bidang keuangan dan ekonomi, keamanan, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, menantang upaya untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran masyarakat internasional. Selain itu, penyebaran kekuasaan global, naiknya regionalisme, dan kehadiran aktor-aktor non-negara yang semakin meningkat mendorong ramifikasi terhadap efektivitas struktur tata kelola global.

MIKTA sebagai kelompok negara-negara *middle powers* berpeluang memperkuat *global governance* dalam menjawab tantangan dinamika internasional. Sebagaimana diketahui, saat ini MIKTA memiliki tujuh prioritas utama, yaitu:

- i) kontra-terorisme dan keamanan global;
- ii) pemeliharaan perdamaian;
- iii) pembangunan berkelanjutan;
- iv) kesetaraan gender;
- v) pemerintahan yang baik dan demokrasi;
- vi) energi; serta
- vii) perdagangan dan ekonomi.

The 4th MIKTA Speakers' Consultation kali ini membahas empat isu. Sesi pertama, *Creative Industries to Support Inclusive Economic Growth* yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea. Industri kreatif yang menggabungkan ide-ide kreatif dengan teknologi untuk mengembangkan industri tradisional, telah berhasil menciptakan pasar baru dan memperluas lapangan kerja. Parlemen meyakini industri kreatif telah membawa era baru dalam dunia usaha. Keberhasilan Industri kreatif Republik Korea yang mendapatkan reputasi dunia menggugah kita untuk terus mengembangkan sektor industri ini.

Perdamaian dunia adalah harapan kita bersama. Pada sesi kedua, *Maintaining Peace and Security: Empowering the United Nations* didiskusikan dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Turki. Turki telah lama menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik dan perang yang sekarang terjadi

di seluruh dunia telah memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka. Konflik bersenjata telah berubah menjadi krisis kemanusiaan. Dunia sekarang diminta untuk mengintensifkan upaya penyelesaian krisis dalam waktu sesingkat mungkin. Fungsi PBB, khususnya DK menjadi tidak efektif ketika ada situasi di mana krisis terjadi di daerah-daerah yang memiliki hubungan dengan lima Anggota Tetap DK PBB. Oleh karena itu, gagasan untuk mereformasi mekanisme global saat ini, terutama reformasi PBB dan DK PBB, sepatutnya dipertimbangkan.

Dalam sesi ketiga, dibicarakan *the Role of Women in Peace and Security* dengan dipimpin Wakil Presiden Senat Australia. Dalam masalah perdamaian dan keamanan, Australia telah mengembangkan Aksi Nasional Australia tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan 2012–2018. Partisipasi perempuan sangat penting untuk mencapai dan memelihara perdamaian. Resolusi DK PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di tahun 2000, menegaskan peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, serta mendorong peningkatan peran perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian. Resolusi ini juga menyerukan kepada semua pihak untuk melindungi perempuan dari pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan mereka mendapatkan akses atas pelayanan yang setara dan non-diskriminatif.

Selanjutnya, pada sesi keempat, dibahas *Maritime Cooperation for Sustainable Growth and Prosperity*. Sesi terakhir ini dipimpin Indonesia. Kerja sama maritim dianggap sangat strategis bagi Indonesia. Laut memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan kesejahteraan dunia. Laut berfungsi tidak hanya sebagai jalur perdagangan dan transportasi dunia yang signifikan tetapi juga memiliki sumber daya yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lima negara anggota MIKTA berbatasan langsung dengan laut sehingga upaya pemberdayaan maritim sangat relevan dengan pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan di setiap negara. Namun, masalah maritim juga terkait erat dengan tantangan keamanan seperti kejahatan lintas batas; *illegal, unreported* dan *unregulated (IUU) fishing*; dan lain-lain. Kerja sama maritim MIKTA akan secara signifikan meningkatkan potensi pengembangan laut untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan negara-negara anggotanya.

Session I

Creative Industries to Support Inclusive Economic Growth

Sesi I, dengan tema *Creative Industries to Support Inclusive Economic Growth* dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea dan dimulai pada pukul 10:15, di Istana Tampaksiring, Bali.

Pengantar Ketua Majelis Nasional Republik Korea (Yang Mulia Mr. Moon Hee-Sang)

Ketua Majelis Nasional Republik Korea mengawali dengan menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan tuan rumah Indonesia dalam pelaksanaan *Asian Games*.



Keikutsertaan Korea dalam *Asian Games* kali ini sangat menyentuh karena ada beberapa tim yang bersatu di bawah nama *Unified Korea*.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea menekankan bahwa sejak krisis finansial dunia, semua negara melihat adanya peningkatan pendapatan masyarakat, namun ada kesenjangan taraf hidup masyarakat, dan ada stagnasi upah di tingkat pendapatan rendah. Akibatnya terjadi polarisasi masyarakat. Oleh karena itu harus ada kebijakan agar ekonomi bisa sampai pada masyarakat lebih miskin. Situasi dan kondisi membutuhkan pertumbuhan yang melibatkan semua aktor masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pertumbuhan ekonomi harus merata untuk semua masyarakat.

Pembangunan inklusif dibutuhkan untuk pemerataan. Transformasi ini juga telah mempercepat perubahan, dengan adanya konvergensi, hiperkonentivitas, dan hiper-intelegensia. Di era saat ini sulit untuk menghindari arus revolusi industri keempat. Kecerdasan buatan dan konvergensi akan menghasilkan perubahan yang fundamental dengan dampak yang signifikan pada struktur industri keseluruhan yang tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga membuka peluang.

Selanjutnya Ketua Majelis Nasional Republik Korea menyampaikan bahwa evolusi teknologi diperkirakan akan meningkatkan produktivitas pada tingkat dan skala yang belum dapat dipastikan. Selain itu Beliau mengkhawatirkan kemungkinan dampak negatif dan ketidaksetaraan yang muncul. Oleh karena itu, semua keahlian dan pengaturan harus benar-benar dimanfaatkan untuk meminimalisir dampak negatif. Inovasi berbasis kreativitas merupakan salah satu unsur mendasar dalam persiapan menghadapi revolusi industri keempat. Gagasan ini menjadi kunci dari revolusi industri tersebut. Akan tetapi, jika kita tidak memberikan peluang yang setara dalam partisipasi proses inovasi, atau produk inovasi tidak didistribusikan secara merata, maka Beliau mengkhawatirkan tidak akan bisa memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selama lima tahun berturut-turut, Republik Korea menempati posisi teratas dalam global indeks untuk kreativitas. Capaian Ini merupakan pengakuan terhadap upaya Republik Korea untuk membuat pasar-pasar baru dan menggabungkan gagasan dan teknologi baru. Republik Korea terus memperluas cakrawala pertumbuhan inklusif berdasarkan apa yang telah dicapai sampai saat ini. Republik Korea harus membangun sebuah konsensus tentang kebutuhan masyarakat dan upaya untuk merealisasikannya.

Jawaban dari tantangan tersebut ditemukan dalam paradigma ekonomi yang berbasis masyarakat. Ekonomi yang berbasis masyarakat dimulai dari manusia, dari masyarakat. Tujuan dari ekonomi berbasis masyarakat adalah kesejahteraan inklusif di mana manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan filosofi Ketua Majelis Nasional Republik Korea secara pribadi yaitu kesejahteraan inklusif menjembatani antargenerasi, tingkat pendapatan, dan menempatkan manusia sebagai prioritas. Manfaat dinikmati bersama oleh masyarakat secara harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Ekonomi berbasis masyarakat untuk kesejahteraan inklusif mempunyai tiga pilar untuk hasil yang sinergistik. Pilar pertama adalah pertumbuhan yang didorong oleh pendapatan yang merujuk pada siklus pertumbuhan dan distribusi yang diciptakan oleh pekerjaan yang layak dan pendapatan rumah tangga yang baik. Organisasi perbankan dunia memiliki pemahaman yang sama dalam hal ini, bahwa ketidaksetaraan pendapatan dan distribusi kemungkinan besar akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu muncul rekomendasi agar kebijakan dilaksanakan secara inklusif melalui peningkatan pendapatan kelas menengah dan pengentasan kemiskinan.

Pilar kedua adalah pertumbuhan inovatif. Pada sisi *demand*, ada pertumbuhan yang didorong oleh pendapatan. Sedangkan pada sisi *supply*, ada ekonomi berbasis inovasi yang berdampak signifikan terhadap masyarakat. Pilar ketiga adalah ekonomi yang adil. Harus ada peraturan yang adil. Semua aktor ekonomi harus mendapatkan kompensasi secara layak sesuai kontribusi yang mereka berikan.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea menekankan bahwa pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dimungkinkan apabila ekonomi dijadikan dasar yang kuat dan menggunakan pertumbuhan (termasuk pertumbuhan ekonomi inovatif) berdasarkan pendapatan sebagai salah satu bagian penting. Masa depan akan sulit dipersiapkan jika pertumbuhan inklusif tidak diperkuat oleh inovasi, dan pertumbuhan inovatif tidak akan berkelanjutan jika tidak mementingkan manusia/masyarakat.

Beliau memberikan contoh, bahwa skenario film yang baik akan sulit direalisasikan jika tidak didukung dengan proses produksi yang baik. Pertumbuhan inklusif dan inovatif dapat menyentuh masyarakat ketika ada pengaturan, ada legislasi yang dibuat oleh parlemen. Ada tiga visi Parlemen Republik Korea seperti tercantum dalam Cetak Biru Parlemen, yaitu parlemen yang kooperatif, konsultatif, dan kompeten yang berorientasi pada masa depan.

Pada bulan Juli 2018, tiga partai utama di Majelis Nasional Republik Korea sepakat untuk menyetujui proposal yang mendukung pertumbuhan inovatif dan membuat satu gugus tugas untuk menangani legislasi berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Gugus tugas ini sudah mendiskusikan legislasi untuk industri-industri baru, seperti perbankan *online*. Majelis Nasional Republik Korea menyadari bahwa parlemen harus cepat dan fleksibel dalam membuat peraturan yang mendukung pembangunan teknologi-teknologi baru agar dapat berkontribusi secara terbuka yang kondusif.

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan menekankan bahwa inovasi teknologi dan industri sangat penting di masa ini. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh terlupakan, yaitu tujuan inovasi adalah untuk masyarakat, tidak hanya dalam proses tetapi juga dalam hasil. Jika masyarakat tidak diperhatikan, maka inovasi tidak akan berkelanjutan dan tidak akan bertahan lama.

Hal terakhir yang disampaikan oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea adalah pentingnya kerja sama antar-negara untuk mengisi kesenjangan di tingkat global. Pertemuan eksklusif sebaiknya tidak hanya membahas permasalahan dalam negeri suatu negara, melainkan masalah global internasional seperti SDGs. SDGs yang diadopsi pemimpin dunia pada tahun 2015 juga mensyaratkan pentingnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Negara-negara yang menerapkan SDGs dan tidak ingin meninggalkan satu negarapun dan semua harus menerima manfaatnya. Negara-negara MIKTA harus bekerja sama agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.

Cakrawala pembangunan inklusif dapat diperluas dan manfaat dari pertemuan ini dapat dilipatgandakan bahkan sampai tiga kali lipat. Ketua Majelis Nasional Republik Korea menyampaikan satu adagium, apabila anda ingin berjalan cepat, pergilah sendiri. tetapi kalau anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Saat ini adalah era di mana kita harus berjalan bersama-sama. Kita bisa mendapatkan manfaat lebih besar apabila kita bersama-sama melaksanakan kerja. Kita bisa hidup dengan baik dan sejahtera apabila kita melakukan perjalanan bersama-sama dan tidak meninggalkan siapa pun.

Tanggapan Wakil Ketua Parlemen Turki (Yang Mulia Mr. Mustafa Şentop)

Istilah ekonomi kreatif telah kita dengar dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Konsep ini juga disebut industri kebudayaan atau industri kreatif yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari arsitektur kesenian dan budaya, kerajinan, desain, fashion, film, *software*, *interactive game*, produk cetak, sampai radio dan televisi. Pangsa pasar ekonomi kreatif telah melebihi tiga persen di dunia, dan mempekerjakan sekitar 30 juta orang di seluruh dunia.

Untuk Turki, dengan sejarah panjang di bidang seni budaya serta pasar yang besar, ekonomi kreatif telah mendorong ekonomi nasional dan Turki berupaya menyelaraskan legislasi hak cipta dengan pengaturan yang ada di Uni Eropa, Kantor paten Turki terus bekerja sama dan melakukan kesepakatan dengan organisasi dunia. Istanbul bahkan telah ditetapkan sebagai ibukota budaya dan seni pada tahun 2010. Pembangunan inklusif dilakukan dengan memperkuat sektor ekonomi kreatif, dan Turki mendorong kota-kota lain untuk menjadi wilayah/daerah warisan budaya.

Bidang seni lain yang menjadi kebanggaan Turki adalah serial televisi dan film Turki dengan kapasitas produksi yang mampu meningkatkan nilai ekspor sampai sebesar USD200 juta. Selain sebagai pengembang industri dalam negeri, serial televisi juga menjadi wadah pencitraan positif Turki. Sama halnya dengan tayangan serial satu negara yang ditayangkan di negara lain, maka dari waktu ke waktu ada beberapa serial Turki yang menjadi kegemaran di negara lain. Telenovela Brazil pernah sangat digemari di Turki, kemudian digantikan oleh telenovela Meksiko. Sementara telenovela Turki digemari di daerah Balkan dan Timur Tengah.

Beberapa bulan yang lalu, dalam kunjungan ke Bosnia Herzegovina, di kota terpencil di Livno, siswi yang menjadi MC bisa berbahasa Turki dan ternyata belajar hanya dari serial televisi Turki yang ditayangkan di Bosnia Herzegovina. Harapannya, siaran televisi dan serial Turki yang ditayangkan di Indonesia dan di negara anggota MIKTA lainnya dapat bermanfaat dan memperluas kerja sama sosial antarnegara.

Tanggapan Wakil Presiden Senat Australia (Yang Mulia Ms. Sue Lines)

Pada April tahun ini, Wakil Presiden Senat Australia berkesempatan memimpin delegasi Australia ke Korea dan melihat secara langsung tiga pilar yang telah disampaikan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, pada saat berkunjung ke pabrik dengan teknologi yang luar biasa. Delegasi Australia pada saat itu bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Korea mengenai demografi yang semakin menua dan kita juga melihat inovasi di kota Sejong.

Australia selalu menyambut baik komitmen Republik Korea dan fokus Republik Korea dalam sesi industri kreatif ini. Australia menganggap industri kreatif sebagai perpaduan antara ekonomi dengan sektor tradisional dan hal baru seperti yang ditemui di Turki.

Wakil Presiden Senat Australia melihat adanya peningkatan industri arsitektur, industri periklanan, industri desain, dsb. di negaranya. Ekonomi kreatif merupakan

bidang penting bagi Australia, dan sama halnya dengan belajar bahasa Turki melalui televisi di Bosnia Herzegovina, maka orang Inggris mulai belajar budaya Australia melalui film Australia. Oleh karena itu sekarang mereka mendengar orang Inggris, terutama anak muda Inggris menggunakan bahasa percakapan sehari-hari Australia.

Wakil Presiden Senat Australia melihat bahwa industri kreatif merupakan bagian dari industri jasa yang semakin meningkat perannya di Australia dan berkontribusi pada perekonomian melebihi target yang ditetapkan melalui penciptaan lapangan kerja. Industri kreatif di tahun 2008/2009 berkontribusi lebih besar terhadap PDB Australia dibandingkan industri tradisional, seperti pertanian. Saat ini, industri yang berkontribusi paling besar terhadap PDB adalah desain, *fashion*, dan *broadcasting*.

Sebagai orang Australia, setiap kali Wakil Presiden Senat Australia melihat siaran televisi tentang arsitek, *fashion*, dan desain Australia yang dihargai oleh negara lain, Beliau merasa bangga. Beliau menyadari bahwa industri kreatif dapat membangun pemahaman budaya dan menjalin persahabatan yang menjadi unsur penting kerja sama antarnegara. Kita perlihatkan kepada dunia jati diri kita sebagai bangsa dengan identitas dan budaya asli yang memperlihatkan perjalanan sebagai satu bangsa.

Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan menjadi corong Australia dalam mengembangkan kerangka dan industri ekonomi kreatif. Selain itu berbagai upaya baru dilakukan untuk memajukan sektor industri kreatif. Sebelumnya pernah dilaksanakan pameran besar Australia di Turki di tahun 2015, dan tahun ini dilaksanakan di Jepang. Rencananya tahun 2019 pameran dengan pendekatan yang berbeda akan dilaksanakan di 10 negara ASEAN. Pameran menjadi ajang khusus untuk mempromosikan orang Asli Australia, mulai dari pengalaman, tradisi, dan budayanya.

Australia juga melakukan berbagai program secara bilateral, misalnya dengan mempromosikan orang asli Australia, baik pengalaman mereka, tradisi mereka, maupun budaya mereka. Australia juga melakukan berbagai program dalam hubungan bilateral, misalnya *Australia-Indonesia Institute*, *Australia-Korea Foundation*, dan *Council on Australia-Latin America Relations*.

Tanggapan Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis secara global, seiring dengan perkembangan teknologi, pendidikan dan inovasi. Dalam hal dukungan untuk mengembangkan ekonomi kreatif, DPR RI telah mendukung perwujudan komitmen pendanaan melalui anggaran negara seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperkirakan mencapai 13,6 triliun, hingga Kredit Usaha Mikro Indonesia (KUMI) yang mencapai 1,5 triliun. Upaya ini dilakukan untuk memastikan inklusivitas ekonomi termasuk dalam ekonomi kreatif.

DPR RI berpandangan, dukungan terhadap pelaku industri kreatif pemula bermodal kecil dan berpendidikan rendah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah memperbaiki kesadaran para pelaku industri kreatif mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tanpa perlindungan HKI, baik dalam bentuk merek, paten, maupun hak cipta, produk kreatif mudah dibajak dan dimanipulasi dengan nama lain. Perbaikan metode dan perluasan sasaran sosialisasi HKI harus terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku industri kreatif.

DPR RI saat ini tengah memperjuangkan upaya peningkatan kapasitas para pelaku industri kreatif dan pengakuan atas kemampuan mereka yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat (sertifikasi) melalui dukungan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi agar mampu bersaing di era globalisasi.

Lebih lanjut Ketua DPR RI menyampaikan bahwa di Indonesia, industri kreatif yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi kreatif, tidak hanya memberikan nilai tambah secara ekonomi, tetapi nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan. Dari tahun ke tahun, kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat. Sebagai informasi, pada tahun 2016, sektor ini menyumbang 7,44 persen atau sebesar Rp922,58 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Penanganan ekonomi kreatif di Indonesia dilakukan oleh badan khusus yang bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan sasaran strategis antara lain: pertumbuhan PDB ekonomi kreatif; peningkatan serapan tenaga kerja; dan peningkatan kontribusi ekspor/devisa bruto negara. Terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, yaitu bidang aplikasi dan pengembangan permainan; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; *fashion*; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; serta televisi dan radio.

Untuk lebih mengembangkan industri kreatif, Indonesia selaku Koordinator MIKTA tahun 2018 ini mengusung tema "*Fostering Creative Economy and Contributing to Global Peace*" di berbagai pertemuan kerja sama MIKTA. Sejalan dengan tema tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan *MIKTA Experts' Meeting on Inclusive Digital Economy Hub* dan *MIKTA Start-Up Fest*. Pertemuan dimaksud ditujukan untuk membangun jejaring antarpelaku industri kreatif di negara-negara MIKTA.

Selain itu, Indonesia juga akan mengadakan *World Conference on Creative Economy (WCCE)* pada November 2018. DPR RI mengharapkan partisipasi semua anggota MIKTA dalam pertemuan tersebut untuk dapat saling belajar dalam mengembangkan industri kreatif yang lebih baik.

Penutup dari Ketua Majelis Nasional Republik Korea (Yang Mulia Mr. Moon Hee-Sang)

Seluruh pimpinan parlemen telah menyampaikan dukungan terhadap industri kreatif dan juga membahas pertumbuhan yang inklusif. Dalam paparannya telah disampaikan solusi untuk upaya inklusif dalam industri kreatif.

Session II Maintaining Peace and Security: Empowering the UN

Sesi II dimulai pada 11:15 dan dipimpin oleh Turki yang menyampaikan secara singkat mengenai pemberdayaan PBB. Sebagai lembaga perwakilan, diplomasi yang dilaksanakan oleh parlemen juga merupakan cerminan aspirasi masyarakat. Keberadaan

para pimpinan parlemen dalam pertemuan kali ini tidak lain adalah untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus.

Pengantar Wakil Ketua Parlemen Turki (Yang Mulia Mr. Mustafa Şentop)

PBB dibentuk di akhir Perang Dunia (PD) II untuk menjawab tantangan dan kondisi pada saat itu. Sebagai badan internasional, PBB menjadi satu-satunya wadah tempat bertemunya negara-negara di dunia untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Melihat pada tujuan awal tersebut, dapat dikatakan bahwa pada saat ini, PBB semakin tertinggal dan sulit beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada skala dunia.

Tujuan bersama di awal pembentukan PBB adalah untuk mewujudkan perdamaian abadi, memperkuat dasar untuk hidup bersama dalam perdamaian, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, PBB diharapkan dapat mendorong solidaritas warga dunia dalam menyelesaikan permasalahan kelaparan, epidemi, perubahan iklim, diskriminasi, proliferasi senjata pemusnah massal, dan untuk menghasilkan solusi penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Namun disayangkan, saat ini PBB dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut. Turki mengharapkan situasi ini tidak bereskalasi yang dapat mengakibatkan krisis legitimasi dan bahkan krisis eksistensi. Masih ada harapan agar PBB tetap menjadi wadah untuk mendapatkan solusi yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Sebagai badan multilateral resmi, PBB harus memiliki tata kelola yang baik dan mau memperkuat potensinya terutama di usianya yang sudah matang. Kejadian di Palestina menjadi contoh ketidakmampuan DK PBB dalam menjalankan fungsi utamanya.

Kelima Anggota Tetap DK PBB masih terlihat memanfaatkan hak vetonya untuk kepentingan nasional negaranya masing-masing. Sistem yang dibangun berisiko kehilangan legitimasi dan kestabilannya. Inersia yang ditunjukkan DK PBB dalam tragedi di Ukraina dan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat ditoleransi lagi oleh komunitas internasional. DK seharusnya menjadi struktur yang demokratis, transparan, dan adil dan mampu memberikan intervensi pada saat krisis.

Turki telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keinginan reformasi PBB karena PBB merupakan landasan multilateral yang lebih besar dari hanya sekadar lima negara Anggota Tetap DK PBB. Di satu sisi Turki mendukung Sekjen PBB yang ingin melakukan reformasi sistem, di sisi lain Turki selalu siap untuk berkonsultasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan setiap anggota masyarakat dan komunitas internasional.

Sebelum PBB, telah ada lembaga yang mirip dengan PBB yang dibentuk pada akhir PD I. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1920-an merupakan keputusan Konferensi Perdamaian Paris. Struktur yang dibuat pada saat itu, dengan koalisi pasca-PD I, tidak mampu mencegah pecahnya PD II. Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan pada tahun 1944, dan selanjutnya, pada tahun 1945 dibentuklah PBB.

PBB dibentuk dengan melihat kondisi pasca-PD II. Negara yang memiliki hak veto di PBB adalah negara pemenang PD II. Struktur lama yang dibuat sesuai dengan kondisi di tahun 1945, dan tentunya saat ini sudah harus direformasi sesuai dengan

perkembangan kondisi dunia. PBB pada awalnya beranggotakan 53 negara dan sekarang telah mencapai 193 negara anggota. Di awal pembentukannya, masih banyak negara yang belum merdeka. Aktor-aktor kawasan juga sudah banyak bermunculan saat ini. Melihat berbagai dinamika sejak pendirian, organisasi setingkat PBB seharusnya berfungsi dengan mengakui *rule of law* dan legalitas.

Wakil Ketua Parlemen Turki mengangkat permasalahan banyaknya resolusi yang disetujui oleh PBB yang berkaitan dengan Israel, tetapi banyak juga yang belum disetujui karena adanya veto dari Amerika Serikat. Resolusi yang berkait dengan Israel dan Yerusalem banyak juga yang tidak dipatuhi oleh Israel. Sementara komunitas internasional tidak menunjukkan upaya mengawal Israel untuk mematuhi resolusi PBB. Di awal tahun 90-an, sehubungan dengan Irak, Amerika Serikat melakukan intervensi, begitu juga dengan Iran, di awal 2000 menerima intervensi Amerika Serikat agar masing-masing negara mematuhi resolusi PBB. Jika ingin adil, maka resolusi, peraturan, dan prinsip-prinsip yang diadopsi oleh PBB seharusnya dilaksanakan oleh semua negara.

Turki berada di tengah kawasan yang mengalami banyak konflik. Resolusi damai diperlukan sebagai prasyarat keamanan dan pembangunan. Sebagai bagian dari resolusi damai, Turki aktif dalam berbagai forum, khususnya PBB. Prinsip utama Turki dalam kebijakan luar negeri adalah perdamaian. Prinsip yang kuat dan Turki mengambil langkah-langkah menuju resolusi penyelesaian krisis dan membina kerja sama antarnegara di dunia. Dan masyarakat Turki menjadi inti dari semua kebijakan dan semua prakarsa.

Memasuki tahun kedelapan konflik Suriah, Turki melihat bahwa lamanya penyelesaian konflik telah mengakibatkan kerugian di berbagai dimensi melebihi kerugian yang ditemui dalam konflik lain bahkan PD II. Saat ini Turki menampung 3,5 juta pengungsi Suriah. Sebagai bentuk penyelesaian krisis dan dalam upaya menjaga stabilitas, Turki memberikan pendidikan dan pelatihan bahasa, dan juga membuka lapangan kerja untuk pengungsi Suriah. Turki meyakini bahwa pendidikan adalah landasan pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan SDGs.

Turki berpandangan bahwa konflik harus diselesaikan secara damai. Mediasi merupakan upaya penting dan Turki bersama Finlandia telah mengusulkan mediasi damai sebagai alternatif untuk penyelesaian konflik sejak tahun 2010. Sudah empat resolusi yang memuat mediasi damai disetujui di PBB sebagai bagian dari prakarsa ini. Turki bersama Finlandia menjadi pemimpin gabungan untuk *Group of Friends of Mediation* yang beranggotakan 48 negara dan 8 lembaga internasional.

Kegiatan Turki sehubungan dengan mediasi tidak terbatas hanya pada kerja sama dengan PBB saja. Turki juga mendorong upaya pengembangan kapasitas mediasi di lembaga-lembaga lain seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Organization of Islamic Conference* (OIC). Menurut Turki, OIC merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB, dari segi luas geografis dan populasi penduduk. Turki akan terus memainkan peran dalam kerja sama dengan negara lain, termasuk dengan Spanyol dalam prakarsa aliansi kebudayaan dan aliansi peradaban.

Turki juga berupaya melakukan inovasi sosial sebagai komitmen politik bersama untuk memerangi mispersepsi dan defamasi, marginalisasi, xenofobia, yang mengakibatkan munculnya ekstremisme. Turki menyangkan Islamofobia yang terus meningkat di Eropa dan Amerika Serikat.

Tanggapan Ketua Majelis Nasional Republik Korea (Yang Mulia Mr. Moon Hee-Sang)

Ketua Majelis Nasional Republik Korea juga beranggapan bahwa konflik dan sengketa internasional di Timur Tengah dan Suriah pada saat ini sangat mengganggu perdamaian dunia. Banyak warga sipil kehilangan nyawa atau harus meninggalkan tempat tinggalnya. Tindakan kelompok ekstremis seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), telah menelan banyak korban tidak berdosa di seluruh dunia.

Beberapa tahun terakhir, anggota MIKTA telah bekerja sama dan berkomitmen untuk merespons tantangan ekstremisme dan kekerasan. Salah satu contoh baik adalah pertemuan menteri luar negeri negara anggota MIKTA yang mengutuk serangan bom yang hampir serentak terjadi di Istanbul - Turki dan Surabaya - Indonesia dengan mengadopsi berbagai pernyataan bersama.

Tindakan teroris yang keji dan melanggar perdamaian tidak boleh menghambat upaya dan kerja sama negara anggota MIKTA untuk mencegah terorisme. Peningkatan konflik dan terorisme di dunia merupakan ancaman keamanan baru. Respons yang diberikan dalam bentuk kerja sama saja tidak cukup. Koordinasi masih tetap diperlukan dan dapat dilakukan di PBB.

Republik Korea masih beranggapan bahwa PBB merupakan organisasi global yang memiliki legitimasi dan otoritas untuk melaksanakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB telah menyusun berbagai peraturan yang perlu untuk merespons invasi kekuatan yang tidak bersahabat atau bentuk terorisme baru yang berkontribusi pada perdamaian dan keamanan. Salah satu contohnya adalah pembentukan non-proliferasi yang berdampak penting bagi masyarakat internasional melalui organisasi IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Permintaan atas pasukan penjaga perdamaian PBB semakin meningkat untuk merespons berbagai konflik dan terorisme yang muncul pasca-perang dingin.

Republik Korea juga selalu berupaya untuk berkontribusi dalam perdamaian kawasan internasional dan penguatan kerja sama dengan atau dalam PBB melalui *Peacekeeping Operation*. Selain itu PBB juga memiliki *Peace Keeping* dan *Peace-Building Commission* (PBC) untuk mencegah konflik. Tahun lalu Republik Korea merupakan ketua dari PBC dan tahun ini menjadi wakil ketua.

Perjalanan PBB untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia adalah perjalanan panjang dan masih jauh ke depan. Tanggung jawab dan kewenangan utama PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional diberikan kepada DK PBB. Tetapi karena keterbatasan internalnya, Republik Korea menilai bahwa fungsi penjaminan keselamatan kolektif PBB tidak efektif.

Struktur DK PBB dengan lima Anggota Tetap dan 10 Anggota Tidak Tetap kurang terwakilkan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya terjadi konfrontasi dan kesewenangan penggunaan hak veto yang menyebabkan tidak efektifnya penyelesaian konflik dan sengketa. Ketua Majelis Nasional Republik Korea masih teringat kegagalan DK PBB dalam merespons secara tepat waktu perang saudara di Bosnia dan Rwanda yang mengakibatkan nyawa ratusan ribu orang hilang. Untuk mereformasi kelemahan DK PBB, pada tahun 2004 Sekjen PBB mengusulkan reformasi DK PBB. Tetapi karena adanya perbedaan cara pandang, hanya terjadi sedikit perubahan. Akibatnya dapat dilihat dari situasi di Suriah yang menjadi contoh adanya *deadlock* di DK PBB.

Reformasi DK PBB memang diperlukan untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB harus lebih demokratis dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya secara efektif. Oleh karena itu, Republik Korea menghargai upaya untuk mendiskusikan kemungkinan reformasi DK PBB di antara negara anggota MIKTA. Alternatif yang diusulkan mungkin dapat berbentuk peningkatan jumlah Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap atau pun hanya meningkatkan jumlah Anggota Tidak Tetap melalui pemilihan secara berkala.

Dalam konteks reformasi ini, parlemen sebenarnya memiliki banyak pengalaman mengenai penyatuan berbagai pandangan yang berbeda. Parlemen negara MIKTA dapat memainkan peran penting dalam proses ini, karena tidak ada lembaga lain yang memiliki pengalaman lebih kaya terkait dengan permasalahan representasi, transparansi, dan akuntabilitas selain lembaga legislatif. Di tengah-tengah konflik kepentingan di berbagai kekuatan dan berbagai negara di dunia, terkait dengan DK PBB, tidak ada organisasi yang lebih memiliki kewenangan dan keterampilan untuk membangun kemitraan daripada MIKTA. Mungkin juga dapat dibangun perspektif bersama dari MIKTA untuk reformasi DK PBB.

Misi PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional memiliki sejarah panjang di Republik Korea. Fungsi DK PBB untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Korea adalah berdasarkan Resolusi DK PBB 82 yang menentang invasi Korea Utara ke Korea Selatan pada tahun 1950. Republik Korea tidak akan pernah melupakan penerjunan pasukan dan pemberian bahan kebutuhan dasar pada saat Perang Korea. PBB juga terus mendukung upaya Republik Korea untuk mencapai derekognisasi dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea juga berharap PBB dapat melaksanakan reformasi dan mengundang masyarakat internasional dalam penyelesaian masalah di Semenanjung Korea. Semenanjung Korea merupakan salah satu sisa Perang Dingin. Pada kesempatan ini, Ketua Majelis Nasional Republik Korea meminta dukungan parlemen negara MIKTA terhadap penyelesaian masalah di Semenanjung Korea. KTT Antar-Korea akan dilaksanakan untuk ketiga kalinya pada September ini. KTT dipimpin oleh Presiden Moon Jae-in dan menjadi titik balik transformasi penanganan Perang Korea menjadi proses damai dan dialog. Untuk pertama kalinya pada 14 September dibuka *Inter-Korean Liaison Office*. *Inter-Korea Summit* mempunyai arti penting, tidak hanya dalam upaya memperbaiki hubungan kedua Korea, tetapi juga hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat. Dukungan yang diharapkan dari MIKTA bukan hanya untuk upaya yang dilakukan Republik Korea, tetapi juga untuk keberhasilan dialog. Negara anggota MIKTA diharapkan dapat membantu membujuk Korea Utara untuk segera menjadi warga dunia yang normal untuk bersama membangun dan mencapai kesejahteraan.

Tanggapan Wakil Presiden Senat Australia (Yang Mulia Ms. Sue Lines)

Sebagai negara, tidak ada satu pun dari kita yang kebal dari konflik. Dan sebagai negara menengah dan anggota MIKTA, kita semua juga bertanggung jawab dalam menyerukan dan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dunia, serta menyelesaikan konflik yang tengah berlangsung. Ketua Majelis Nasional Republik Korea

tadi sempat menyebutkan peran Kofi Annan yang telah mendapatkan Nobel Perdamaian atas kontribusinya dalam revitalisasi PBB dan menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu prioritas PBB.

Australia menyambut baik berbagai kontribusi dari rekan-rekan MIKTA dalam upaya mewujudkan perdamaian yang dilakukan melalui PBB. Australia pernah menjadi *co-chair* untuk UN CIC untuk resolusi perdamaian pada April 2016, dan terus berperan dalam menjaga perdamaian.

Australia mendukung keinginan Republik Korea untuk mewujudkan perdamaian abadi di Semenanjung Korea. Keinginan yang sama juga pernah disampaikan ke Delegasi Australia saat berkunjung ke Korea pada April lalu.

Wakil Presiden Senat Australia mengapresiasi upaya mediasi yang diangkat oleh Wakil Ketua Parlemen Turki. Kemampuan mediasi setiap negara anggota MIKTA perlu diperkuat. PBB telah berupaya melakukannya melalui *release* laporan mediasi yang menginformasikan strategi penguatan kapasitas PBB. Diikuti sertakannya *envoy* dan anggota mediasi senior merupakan upaya meningkatkan keahlian mediasi khususnya dalam rangka menjaga perdamaian. Upaya mediasi internasional imparisial merupakan lini terdepan dalam pencegahan konflik. Oleh karena itu Australia mendukung dana alokasi khusus, dan saat ini mengalokasikan hampir AUD10 juta di *Department of Political Affairs* untuk dana non-alokasi.

Australia seperti halnya negara MIKTA lainnya meyakini bahwa reformasi PBB mempunyai arti penting. Tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas PBB, tetapi juga untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.

Tanggapan Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Situasi global saat ini belum sepenuhnya terbebas dari konflik dan perang. Sebagian masyarakat internasional masih menghadapi persoalan keamanan yang sangat memprihatinkan dan mengancam kelangsungan hidup. Hal tersebut terlihat dari berbagai konflik yang terus terjadi. Korban jiwa terus berjatuhan akibat konflik dan aksi kekerasan.

Menurut Ketua DPR RI, situasi keamanan di Semenanjung Korea dan belum tercapainya perdamaian secara permanen di kawasan ini juga menjadi tantangan bersama, meski situasinya belakangan ini cukup kondusif. Oleh karena itu, DPR RI sangat mengapresiasi pertemuan bersejarah antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un pada bulan April yang lalu. Apresiasi juga disampaikan untuk pertemuan tingkat tinggi ketiga Republik Korea dan Republik Demokratik Korea di Pyongyang tanggal 18–20 September 2018.

Keberadaan senjata nuklir di dunia, yang dimiliki oleh sejumlah negara, juga menjadi ancaman serius bagi keamanan internasional. Bagi DPR RI, keberadaan senjata nuklir di dunia, berapa pun jumlahnya adalah membahayakan dan bisa mengancam perdamaian dunia yang selalu diperjuangkan. Ketua DPR RI menyerukan kepada negara-negara di dunia, termasuk negara anggota MIKTA, untuk menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir yang telah diadopsi PBB pada 7 Juli 2017. Indonesia, bersama sejumlah negara di dunia, telah menandatangani traktat tersebut pada bulan September 2017.

Indonesia juga menyoroti maraknya aksi terorisme di berbagai belahan dunia yang mengganggu ketenteraman dan keamanan kawasan. Beberapa kali Indonesia mengalami serangan terorisme termasuk bom bunuh diri yang menarget aparat penegak hukum beberapa waktu yang lalu. Untuk itu DPR RI telah mengadopsi UU Anti-terorisme baru sebagai kerangka legal penanganan kejahatan terorisme di Indonesia. DPR RI juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kerja sama terorisme antarnegara. DPR RI mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Australia, dan juga kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Turki, dalam penanggulangan terorisme.

Upaya PBB dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat internasional, terutama ketika upaya PBB tersebut dihadapkan pada kepentingan negara Anggota Tetap DK PBB. Dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, misalnya, DK PBB seakan tidak berdaya menghadapi Amerika Serikat, sebagai Anggota Tetap DK PBB, yang beberapa kali menggunakan hak vetonya menentang draf resolusi DK PBB yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina.

Situasi PBB seperti ini perlu dikritisi dengan mendorong kembali proses reformasi di dalam tubuh PBB, khususnya DK, agar badan dunia ini bisa berperan lebih baik dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia sesuai dengan harapan masyarakat internasional dan sesuai harapan kita semua. Fokus reformasi DK PBB harus ditujukan pada upaya untuk menjadikan DK lebih demokratis dan representatif. Hak veto juga perlu dipikirkan ulang keberadaannya. Bagi Indonesia, hak veto sangat tidak demokratis dan tidak mewakili suara Anggota PBB. Apalagi hak veto selalu dimanfaatkan untuk kepentingan negara pemegang hak veto.

Sejalan dengan terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019–2020, DPR RI mendukung empat prioritas yang akan dijalankan pemerintah Indonesia di DK PBB termasuk prioritas terkait sinergi upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan berkelanjutan. Untuk itu upaya penciptaan perdamaian juga harus dilakukan melalui peningkatan peran parlemen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kerja sama antarparlemen menjadi bagian penting dalam upaya-upaya tersebut, termasuk melalui *2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development*.

Hasil dari Forum tersebut adalah:

- menegaskan komitmen parlemen untuk meningkatkan kesadaran parlemen akan pentingnya pencapaian SDGs;
- upaya kerja sama erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai SDGs melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- menindaklanjuti hasil Forum dunia tersebut di berbagai level melalui kemitraan dengan pihak lain; dan
- memastikan WPFSD sebagai forum kunci parlemen dalam pencapaian SDGs.

Parlemen negara MIKTA harus mengawal dan memastikan bahwa pemerintah masing-masing negara berperan dan berkontribusi dalam dunia keamanan internasional dan perdamaian dunia.

Penutup dari Wakil Ketua Parlemen Turki (Yang Mulia Mr. Mustafa Şentop)

Dalam pertemuan bilateral dengan Indonesia kemarin telah disampaikan bahwa Turki dan Indonesia memiliki kesamaan pendapat terutama terkait dengan bagaimana hak veto tidaklah demokratis. Kenyataan bahwa negara MIKTA dapat menjadi pionir dalam reformasi PBB merupakan salah satu bagian penting lain yang disampaikan oleh Ketua DPR RI dalam paparannya.

Jumlah orang yang meninggal dalam PD I adalah 9,5 juta orang, dan jumlah ini meningkat pada PD II. Jika terjadi PD lagi, diperkirakan akan menelan korban 65 juta orang. Tetapi dari 9,5 juta orang yang meninggal di PD I, 95 persen adalah tentara, hanya lima persen yang merupakan orang sipil. Sementara di PD II, 35 persen yang meninggal adalah orang sipil, dan 65 persen adalah tentara. Setelah PD II kita melihat bahwa korban konflik di dunia sebagian besar adalah orang sipil. Terjadi penurunan korban di kalangan tentara karena mereka sudah dilatih secara profesional.

Tetapi ada permasalahan baru karena saat ini marak digunakan senjata pemusnah massal. Biaya militer dan konflik bersenjata adalah biaya kemanusiaan. Oleh karena itu mereformasi PBB dan memastikan PBB mampu menjalankan perannya secara lebih efektif sangat diperlukan. Kita mengharapkan PBB yang lebih adil.

Session III The Role of Women in Peace and Security

Sesi III dimulai pukul 13:00 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Senat Australia. Sen. Sue Lines memimpin Sesi Peran Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan.

Pengantar dari Wakil Presiden Senat Australia (Yang Mulia Ms. Sue Lines)

Di Sesi I telah didiskusikan tentang teknologi dan industri kreatif, Sesi II mengangkat diskusi mengenai peran MIKTA dalam memberdayakan PBB, termasuk peran perempuan dalam teknologi atau industri kreatif. Perdamaian dan keamanan adalah hal yang menjadi tujuan bersama karena perempuan adalah sebagian dari populasi. Perempuan adalah separuh dari populasi dunia dan dibanyak negara proporsi perempuan lebih dari separuh, termasuk di Australia.

Masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan keikutsertaan perempuan dalam perdamaian baik di parlemen, industri, dan di masyarakat secara umum. Melalui peran perempuan dapat dicapai kesetaraan dan pada saat yang sama taraf kehidupan di negara masing-masing dapat ditingkatkan. Jika negara tidak secara aktif melibatkan perempuan di setiap aspek kehidupan kesejahteraan akan sulit dicapai.

MIKTA mewakili negara dengan berbagai kebudayaan, sejarah, dan latar belakang agama serta lokasi yang membentang di seluruh belahan dunia. Apa yang telah didiskusikan hari ini dan dalam pertemuan MIKTA sebelumnya adalah kesamaan nilai, ide, serta pemikiran atas tantangan yang dihadapi secara global. Diskusi tentang PBB



telah berjalan dengan baik, dan sudah jelas bahwa sebagai negara MIKTA, ada kesamaan pendapat dalam upaya reformasi PBB yang secara efektif dapat mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam beberapa pertemuan terakhir, setiap negara MIKTA menyadari peran perempuan dalam penyelesaian konflik, resolusi konflik, dan motor perdamaian di berbagai belahan dunia. Namun tetap disayangkan, banyak perempuan yang dihadapkan pada konflik. Seperti diingatkan Wakil Ketua Parlemen Turki dalam paparannya tadi dan dilengkapi juga dengan statistik bahwa konflik yang akhir-akhir ini terjadi lebih sering menelan korban masyarakat sipil, dan sering kali mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan penelitian, upaya membangun dan mempertahankan perdamaian merupakan tantangan eksistensial. Sebagai anggota *Inter-Parliamentary Union* (IPU), Australia dan anggota IPU lainnya menyadari bahwa masalah gender adalah topik penting dan akibatnya selalu dibahas di IPU, PBB, dan SDGs. Sasaran SDGs akan sulit dicapai jika kita tidak secara signifikan melibatkan perempuan dan memastikan ada konsultasi dengan perempuan. Partisipasi perempuan dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengambilan keputusan sampai pencapaian target.

Ada korelasi yang sangat besar antara status pembangunan masyarakat dengan kemungkinan adanya perang dan konflik. Meskipun perempuan bisa menjadi pelaku dan juga korban dari kekerasan, tetapi perlu selalu diingat bahwa perempuan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan pola pikir suami maupun anak laki-lakinya. Perempuan dapat mendorong para laki-laki untuk lebih berpihak pada perdamaian atau justru sebaliknya. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi alat yang efektif untuk menanggulangi ekstremisme. Potensi yang ada dalam diri perempuan sangat rugi jika tidak dimaksimalkan. Australia juga berpartisipasi dalam Forum Perempuan PBB. Tetapi dalam demokrasi yang modern seperti Australia pun, masih ditemukan angkatan kerja yang tersegregasi secara gender. Ada perbedaan dalam jumlah pendapatan atau gaji yang diterima perempuan dan laki-laki.

Hal lain yang dikemukakan oleh Wakil Presiden Senat Australia adalah kepastian bagi perempuan dalam menyampaikan aspirasi dan peluang berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Angka statistik memperlihatkan bahwa lebih banyak resolusi konflik yang gagal dalam lima tahun terakhir dan di tahun 90-an karena ketiadaan partisipasi perempuan, dan 90 persen perang sipil pada tahun 2000-an terjadi di negara-negara yang sudah pernah mengalami perang sebelumnya.

Pada 1992 dan 2011, perempuan mewakili kurang dari empat persen dari orang-orang yang bertanda-tangan dalam suatu kesepakatan perdamaian. Apabila perempuan terlibat dalam proses perdamaian dan negosiasi kesepakatan, ada kecenderungan paling tidak 35 persen kesepakatan tersebut akan tetap berlangsung atau bertahan sampai lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2015, perempuan hanya mewakili tiga persen dari pasukan penjaga perdamaian. Meskipun ada upaya-upaya global, dunia masih perlu melakukan banyak hal di bidang ini.

Perlu ada cara pandang menyeluruh dengan melihat dua sisi dari argumentasi yang ada terhadap partisipasi perempuan. Perempuan memainkan peran penting dalam mencegah konflik dan juga untuk mewujudkan perdamaian yang abadi. Negara anggota MIKTA mungkin dapat membantu memperkuat argumentasi ini dengan data yang lebih baik dan memperlihatkan bukti empiris sehingga secara positif dapat memengaruhi diskusi global mengenai peran perempuan.

Berdasarkan pengalaman Australia, upaya mengintegrasikan perempuan ke dalam semua tahapan dan proses perdamaian dan keamanan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Australia terus mencari cara untuk meningkatkan upaya pengintegrasian tersebut. Walaupun sebagai perempuan Wakil Presiden Senat sudah menjadi pimpinan parlemen dengan posisi tinggi, tetapi perempuan di Parlemen Australia masih tergolong kelompok minoritas.

Wakil Presiden Senat Australia memfokuskan partisipasi perempuan di Australia pada tiga bidang, yaitu perempuan, keamanan, dan perdamaian. Guna membangun opini positif tentang perempuan, dalam Angkatan Bersenjata Australia, pemerintah Australia mengadvokasi agenda perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Selain memiliki Rencana Aksi Nasional, Australia juga menjadi anggota dari *The Group of Friends of 1325*, dan menjadi peserta aktif *Group of Network* yang diinisiasi oleh Spanyol.

Perempuan, keamanan, dan perdamaian adalah permasalahan yang harus ditangani secara global walaupun merupakan masalah nasional. Implementasinya harus menjadi prioritas untuk seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah. Wakil Presiden Senat Australia menekankan bahwa konflik bersenjata memiliki dampak yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaannya adalah kerentanan terhadap kekerasan serta risiko dan ancaman yang dihadapi masing-masing kelompok gender.

Australia mempunyai agenda untuk lebih memastikan pendekatan yang lebih inklusif secara gender untuk membangun perdamaian, keamanan, dan rekonstruksi. Resolusi DK PBB 1325 masih menjadi salah satu tonggak terpenting dan resolusi PBB pertama yang secara eksplisit menjawab permasalahan perdamaian dan keamanan, dengan penekanan pada partisipasi perempuan sepenuhnya dalam proses perdamaian termasuk pencegahan konflik dan rekonstruksi pasca-konflik; perspektif gender dalam operasional *peace keeping* dan pelatihannya; perlindungan terhadap perempuan termasuk pencegahan kekerasan berbasis gender; serta perspektif gender dalam pelaporan dan aksi yang dilakukan oleh PBB.

Resolusi ini diturunkan dalam Rencana Aksi Nasional Australia (*National Action Plan*) atau NAP berkaitan dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan. Kami mengembangkan NAP II dan telah melakukan konsultasi dengan instansi pemerintah, departemen pemerintah, dan publik Australia termasuk masyarakat sipil dan LSM. Dari hasil konsultasi tersebut muncul mandat untuk memasukkan perspektif gender dalam upaya melindungi hak asasi perempuan dan anak perempuan, serta perspektif gender dalam manajemen dan resolusi konflik.

Ada lima strategi yang mempertimbangkan perspektif perempuan dalam upaya-upaya perdamaian dan keamanan, yaitu: mengintegrasikan sudut pandang gender dalam kebijakan Australia tentang perdamaian dan keamanan; menyertakan agenda perempuan dan perdamaian dalam pendekatan Australia untuk manajemen sumber daya manusia untuk angkatan bersenjata, kepolisian, dan departemen kepolisian federal Australia dan ini meliputi personel yang tidak hanya dikerahkan tetapi juga ditugaskan; melibatkan LSM agar terjadi peningkatan keikutsertaan perempuan dalam pencegahan konflik, upaya perdamaian, dan juga pemulihan setelahnya; mendorong implementasi perdamaian secara proporsional; serta melakukan pendekatan koordinasi menyeluruh dalam lingkup nasional dan internasional berkaitan dengan perempuan untuk perdamaian dan keamanan.

Salah satu fitur yang menjadi ciri NAP Australia adalah keterlibatan negara yang dekat dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil secara formal terlibat dalam perumusan,

monitoring, dan evaluasi dari NAP Australia. Selain itu mereka juga menghasilkan laporan independen berkaitan dengan proses yang telah dilakukan pemerintah. NAP membuka forum kolaborasi guna mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat sipil untuk memastikan keseriusan selain juga membuka peluang pengembangan kerangka kerja kebijakan dan pelatihan.

Australia sangat mendukung upaya PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi *peace-keeping* atau penjaga perdamaian selama Australia menjadi Anggota DK PBB. Australia mendukung upaya PBB untuk mengarusutamakan agenda perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Peran Australia berkontribusi kepada bahasa yang kuat mengenai perempuan serta permasalahan perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Presiden Senat Australia pun mendukung penguatan perempuan dengan adanya upaya meningkatkan kesadaran tentang agenda perempuan dalam debat di Parlemen Australia.

Australia terus bekerja sama dengan Anggota Dewan Parlemen Australia untuk mempertahankan dan memperkuat bahasa perempuan dalam mandat penjagaan keamanan. Hal ini dilakukan karena ada pemahaman berdasarkan kajian bahwa keterlibatan perempuan akan memastikan efektivitas upaya perdamaian dan keamanan. Perempuan anggota penjaga perdamaian dapat mengakses informasi yang sulit didapat rekan-rekan laki-lakinya.

Wakil Presiden Senat Australia menginformasikan bahwa dalam angkatan bersenjata Australia, agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan bukan hanya tentang kesetaraan dan meningkatkan kapasitas operasional perempuan. Angus Campbell, *Chief of the Defence Force Australia* mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan talenta terbaik untuk berada di angkatan bersenjata Australia, dan talenta terbaik tidak hanya berasal dari separuh populasi Australia.

Pengalaman tanggap bencana di Afghanistan dan pelatihan-pelatihan lain memperlihatkan pentingnya integrasi sudut pandang gender sebagai bagian dari operasi militer. Personil militer perempuan berada pada posisi yang lebih tepat untuk bisa berbicara dengan perempuan lokal dan mengidentifikasi ancaman, kebutuhan masyarakat, serta penanganan mantan kombatan perempuan. Para pemimpin militer mengatakan bahwa perempuan yang berada di desa-desa di Afghanistan lebih bisa terlibat dalam suasana konflik.

Penelitian global PBB berkaitan dengan Resolusi 1325 menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam bantuan humaniter tidak terbatas pada lokasi terdampak konflik saja namun juga pada lokasi bencana alam. Oleh karena itu, Australia juga berusaha meningkatkan kepesertaan perempuan dalam tanggap bencana. Pada Februari 2016, Siklon Winston menghantam Fiji, menghancurkan negeri tersebut, dan menelan 44 korban. Ribuan warga dunia, termasuk Australia, memberikan bantuan kepada Fiji. Australia dengan segera menugaskan *Australian Defence Force* (ADF) yang merupakan operasional ADF pertama yang menyertakan perspektif gender dalam operasional dan perencanaan penugasan. ADF mengidentifikasi dan mengoordinir kelompok kaum perempuan di Fiji berdasarkan masukan dari para penasehat gender. Ke depan Australia akan melibatkan penasehat gender dalam upaya humaniter lainnya.

Peran perempuan dalam keamanan dan perdamaian meningkat secara kualitatif dan kuantitatif sejak tahun 2000an. Wakil Presiden Senat Australia mengakui bahwa banyak hal yang masih perlu dilakukan. Australia tidak bisa bersantai atas pencapaian yang sudah dicapai, dan perempuan harus secara aktif dihimbau untuk terlibat dalam

penanganan masalah ini. Saat ini kapasitas dan kemampuan perempuan untuk peran-peran tertentu sudah menunjukkan perubahan dan perlu dilanjutkan.

Tanggapan Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak berada pada posisi sangat rentan sebagai sasaran dan target kekerasan. Namun demikian bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi agen perdamaian yang memberikan solusi damai dan mencegah konflik untuk tidak terulang kembali.

Peran aktif perempuan dalam dialog dan proses pengambilan keputusan mampu membawa berbagai perubahan nyata di berbagai tatanan, mulai dari keluarga hingga komunitas dan negara. Dan lebih dari itu dalam mencapai kesejahteraan, keadilan sosial, dan perekonomian global yang inklusif serta berkelanjutan, peran perempuan tak terelakkan dan sangat krusial.

Ketua DPR RI menggarisbawahi rekomendasi dari Resolusi PBB 1325 untuk memajukan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan yakni perlindungan, pencegahan, dan partisipasi. Hal tersebut harus menjadi resolusi dan menjadi tonggak penting selain untuk memastikan perlindungan bagi perempuan dalam situasi konflik -khususnya kekerasan seksual- namun juga menegaskan kepemimpinan dan peran penting perempuan dalam proses dan upaya memastikan dan menjaga perdamaian itu sendiri.

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjalankan rekomendasi Resolusi PBB 1325. Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berbagai undang-undang lainnya, Indonesia terus berupaya melindungi dan memajukan hak-hak dan akses perempuan yang setara guna mencegah segala bentuk kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan.

Kebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30 persen bagi perempuan dalam proses politik sebagai adopsi dari *Beijing Platform for Action* tahun 1995 yang mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan dapat terrepresentasikan dengan baik. Keterwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen berdasarkan data IPU pada tahun 2017 sebanyak 19,8 persen dengan rata-rata persentase dunia sebesar 23,6 persen serta melebihi rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara Asia sebanyak 19,7 persen.

Indonesia termasuk 10 negara terbesar penyumbang pasukan perdamaian PBB juga berkontribusi aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian dunia. 80 orang di antaranya adalah kaum perempuan yang turut berpartisipasi aktif dalam misi-misi perdamaian PBB melalui UNIFIL di Lebanon, MINUSTIA di Haiti, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, MINUSMA di Mali, MONUSCO di Kongo, UNAMID di Sudan, dan UNMISS di Sudan Selatan. Pasukan perdamaian perempuan Indonesia dikenal fleksibel dan mampu merebut hati dan kepercayaan masyarakat terutama ibu-ibu, remaja, dan anak-anak di daerah konflik, sehingga memudahkan penggalan operasi serta menyukseskan misi PBB.

Selanjutnya Indonesia memiliki visi mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian dengan di antaranya target di atas 100 pasukan perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen MIKTA dalam upaya meningkatkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pembangunan perdamaian.

Di ranah lokal, perempuan Indonesia mendorong proses perdamaian pasca-konflik Ambon beberapa tahun silam, misalnya melalui proses rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Di Ambon, perempuan mendirikan gerakan perempuan peduli, penciptaan pasar Baku Bae, dan penyembuhan luka psikologis bagi korban-korban konflik. Hal ini mampu mengakselerasi proses rekonsiliasi dengan menciptakan ruang interaksi di antara pihak-pihak yang berkonflik dan membuka sarana komunikasi melalui sarana perdagangan dan sosial. Hal ini menandakan bahwa perempuan memiliki pendekatan yang spesifik dan nirkekerasan dalam penyelesaian konflik yang mampu mendorong terciptanya perdamaian dengan efektif.

Ketua DPR RI mengajak anggota MIKTA untuk lebih mendorong partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan melalui kebijakan yang responsif terhadap isu gender dan membuat diskusi kesetaraan gender yang juga melibatkan kaum laki-laki agar dapat berkontribusi lebih melindungi hak-hak perempuan yang setara, mencegah segala bentuk diskriminasi, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Tanggapan Ketua Majelis Nasional Korea (Yang Mulia Mr. Moon Hee-Sang)

Ketua Majelis Nasional Korea menyayangkan terjadinya konflik seperti krisis Rohingya di Myanmar dan peran sipil di Suriah masih terjadi di seluruh dunia, sehingga memperluas dan memperdalam konflik yang mengancam keamanan dan perdamaian. Perempuan menanggung beban terberat seperti brutalitas konflik, kekerasan, dan juga pelanggaran HAM.

Walaupun beragam kejadian tersebut bukan satu hal baru dalam sejarah kita, tetapi masih jarang ditemui pembahasan dalam negosiasi gencatan senjata karena belum dianggap sebagai kejahatan. Republik Korea konsisten dalam masalah ini, dan salah satu bentuk keseriusannya adalah dengan mengadopsi Resolusi DK PBB 1325 berkaitan dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan pada tahun 2000. Tujuan Republik Korea adalah untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik bersenjata, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik.

Berdasarkan beragam hal tersebut di atas, Republik Korea membuat NAP atau Rencana Aksi Perdamaian untuk Resolusi DK PBB 1325 pada 2014 melalui proses yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perempuan dan Keluarga, serta berbagai kelompok organisasi lain. Republik Korea juga memandatkan kerangka kerja untuk kesetaraan gender sebagai dasar hukum implementasi NAP. Setelah hampir dua dekade sejak Resolusi diadopsi, Republik Korea harus menegaskan kembali pentingnya peran perempuan dalam pencegahan konflik, membangun perdamaian, dan mengidentifikasi upaya menghentikan perang.

Ketua Majelis Nasional Republik Korea meyakini bahwa perempuan mampu memberikan solusi yang lebih damai dalam situasi konflik karena mereka sangat sensitif

terhadap perdamaian. Selain itu kemampuan perempuan untuk berempati dengan korban perang dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan strategi perdamaian yang berkontribusi dalam mencegah konflik dan mewujudkan perdamaian.

Ada dua saran yang disampaikan Ketua Majelis Nasional Republik Korea mengenai cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam mencapai dan mempertahankan perdamaian. Pertama melalui peningkatan kesadaran tentang hak perempuan melalui pendidikan tentang kesetaraan gender. Republik Korea memperluas pendidikan tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan sensitifitas gender untuk prajurit dan militer. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik yang terlibat dalam pencegahan konflik dan kegiatan perdamaian. Pendidikan dilakukan kepada prajurit sebelum dan sesudah penugasan.

Selain bidang perdamaian dan keamanan, Republik Korea juga melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat. Salah satu upayanya adalah minggu pertama Juli ditetapkan sebagai minggu kesetaraan gender dengan slogan, “Jadikan Kesetaraan Gender sebagai Norma”. Beragam kegiatan yang diikuti masyarakat menunjukkan ketertarikan mereka terhadap isu tersebut.

Saran kedua adalah sesuai dengan Resolusi 1325, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Republik Korea saat ini menunjuk enam menteri perempuan dalam kabinetnya dan angka ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah Republik Korea, yaitu 32 persen. Menteri Luar Negeri Republik Korea adalah perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut. Kinerja Menlu sangat baik, terbukti dengan terwujudnya kerja sama dengan masyarakat internasional dalam isu denuklirisasi dan juga membangun perdamaian di Semenanjung Korea.

Pengalaman perempuan yang menjadi wakil di PBB dan kemampuan unik perempuan dalam berempati, mendorong parlemen untuk merevisi undang-undang sehingga perempuan lebih terwakili di parlemen. Selanjutnya terjadi peningkatan jumlah perempuan dalam kontestasi politik. Saat ini anggota parlemen perempuan membentuk organisasi *Korean Women in Politics* sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik. Organisasi ini melakukan berbagai kegiatan termasuk pelatihan kepemimpinan untuk mahasiswa dan aktivis, mengembangkan program keterwakilan perempuan dalam politik, serta menjalankan program pembinaan untuk pemimpin masa depan.

Permasalahan utama dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan adalah perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik. Sampai saat ini Republik Korea masih terus berupaya menangani pelanggaran dan sistem perbudakan seksual yang terjadi pada PD II oleh angkatan bersenjata Jepang. Kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi pada saat perang bersifat universal. Korban masih mengalami penderitaan bahkan setelah PD II berakhir.

Pemerintah Republik Korea bertanggung jawab untuk membangkitkan semangat, menyembuhkan luka, dan mengembalikan martabat para korban. Upaya ini dilakukan sebagai dasar pembangunan masa depan. Tragedi seperti ini jangan pernah lagi terjadi. Selanjutnya Ketua Majelis Nasional Republik Korea meminta perhatian anggota MIKTA tentang permasalahan ini. Republik Korea berjanji akan terus berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan di komunitas internasional dan selalu berupaya melindungi korban dari kekerasan seksual dalam situasi kekerasan bersenjata.

Tanggapan Wakil Ketua Parlemen Turki (Yang Mulia Mr. Mustafa Şentop)

Pada saat ini dampak konflik terhadap perempuan dan anak di dunia sudah mencapai tingkat yang tidak dapat dinegosiasikan lagi. Oleh karena itu masyarakat internasional perlu berperan aktif dalam memberikan solusi. Ada kewajiban dari seluruh negara di dunia untuk melakukan pendekatan holistik seperti misalnya tindakan dunia terhadap kelompok organisasi teroris ISIS dan Boko Haram.

Walaupun pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam hal bernegosiasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan, namun sangat disayangkan langkah ini belum menjadi pilihan utama. Resolusi DK PBB 1325 merupakan tonggak penting terkait dengan dampak konflik terhadap perempuan. Tugas negara Anggota PBB dalam pelaksanaan resolusi tersebut adalah untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam menjaga perdamaian. Wakil Ketua Parlemen Turki mengingatkan apabila perempuan diberi kesempatan, mereka dapat mencapai tujuan utama.

Turki sudah berinisiatif mengusung mediasi perdamaian bersama Finlandia di New York dalam penyelesaian konflik. Turki saat ini masih menjadi wakil dari badan PBB untuk mediasi. Negara Anggota PBB sudah menyadari bahwa perempuan harus lebih dilibatkan dalam proses mediasi. Selain PBB, Turki juga mendorong upaya mediasi perempuan dalam kerangka OIC.

Ketua DPR RI dan Ketua Majelis Nasional Republik Korea telah menyampaikan pendapat mengenai representasi perempuan dan Turki satu suara dengan pendapat tersebut. Tentu saja persyaratan utama untuk meningkatkan representasi perempuan dalam proses ini adalah kesetaraan. Perempuan mewakili separuh dari populasi dunia, dan apabila ada proses yang tidak mendapatkan keterwakilan perempuan maka proses tersebut tidaklah lengkap dan akan merugi. Hampir 50 persen kesepakatan yang dicapai sebelum tahun 2000 itu berhasil. Ketika suatu proses tidak melibatkan perempuan, tingkat keberhasilannya hanya separuh.

Masih tentang kesetaraan, Wakil Ketua Parlemen Turki juga mengingatkan untuk selalu mempertimbangkan perspektif yang berbeda yang berasal dari penasehat gender. Perempuan memiliki pendekatan yang berorientasi ke masa yang akan datang dengan mempertimbangkan pihak lain terutama keluarga dan anak-anak mereka. Karena itu, perempuan dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam proses pertimbangan. Turki melihat bahwa sikap dan contoh yang mengedepankan kepemimpinan perempuan sudah menunjukkan keberhasilan. Sehingga kita harus meningkatkan peran perempuan dalam mediasi.

Penutup dari Wakil Presiden Senat Australia (Yang Mulia Ms. Sue Lines)

Dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan masih menjadi target aspirasional dan bukan target yang dilaksanakan. Secara garis besarnya, semua negara anggota MIKTA bersepakat akan pentingnya perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan. Seperti yang ditekankan oleh Turki, diskusi ini harusnya berkelanjutan dan MIKTA harus lebih proaktif untuk memastikan bahwa bukan saja kebijakan inklusif gender yang diterapkan, tetapi kebijakan tersebut harus benar-benar dipraktikkan agar kesetaraan gender yang sesungguhnya dapat dicapai.

Session IV

Maritime Cooperation for Sustainable Growth and Prosperity

Sesi IV dimulai pada pukul 15:00 dengan tema *Maritime Cooperation for Sustainable Growth and Prosperity*. Sesi dipimpin oleh Ketua DPR RI yang membuka sesi dengan pemahaman bahwa kelima negara anggota MIKTA berbatasan langsung dengan laut sehingga upaya pemberdayaan maritim sangat relevan dengan pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan di setiap negara.

Pengantar dari Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Kerja sama maritim antarnegara MIKTA secara signifikan akan meningkatkan potensi pengembangan laut untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi rakyat di negara-negara anggotanya. Upaya untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan lingkungan ekosistem laut telah menjadi tantangan MIKTA. Ketua DPR menekankan bahwa laut memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan kesejahteraan dunia. Laut berfungsi tidak hanya sebagai jalur perdagangan dan transportasi dunia, tetapi juga sebagai sumber daya perikanan, minyak dan gas, serta potensi pariwisata bagi masyarakat dunia.

Banyak sektor kemaritiman yang bisa dikerjasamakan, di antaranya kerja sama ekonomi bidang maritim, keamanan maritim, memerangi penangkapan ikan ilegal, keselamatan maritim, kolaborasi ilmu kelautan, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Bagi Indonesia, kerja sama bidang maritim untuk peningkatan perekonomian adalah sangat strategis. Selain dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan, Indonesia juga terletak di jalur strategis perdagangan dunia.

Indonesia selalu berupaya agar kawasan perairan yang penting bagi perdagangan internasional yang ada di wilayah Indonesia selalu aman bagi pelayaran internasional. Dengan memanfaatkan keuntungan geografis tersebut, saat ini Indonesia memiliki kebijakan Poros Maritim Dunia. Ketua DPR RI menginformasikan bahwa Indonesia memiliki tidak kurang dari 17.500 pulau.

Kerja sama maritim untuk pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan sesungguhnya juga merupakan bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia. Karena di sini ditekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam mengelola potensi kelautan. Kerja sama tersebut haruslah membawa manfaat bagi setiap negara dan juga masyarakat setempat.

Saat ini sektor kelautan berkontribusi 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan peluang lapangan pekerjaan yang luas di seluruh Indonesia. Visi Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” berupaya mewujudkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sektor kelautan dan perikanan menjadi unggulan melalui pembangunan ekonomi menyeluruh berbasis kemaritiman tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Upaya menjaga kelestarian laut, serta sumber daya pesisir untuk kepentingan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, menjadi komitmen kami di Indonesia.



Upaya melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan, sebagai salah satu indikator keberhasilan SDGs, sudah seharusnya menjadi komitmen kita bersama sesama anggota MIKTA. Ini akan menjadi satu dari sekian upaya untuk terus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui *blue economy*.

Indonesia dapat belajar lebih banyak lagi dari negara anggota MIKTA yang terlebih dahulu mengembangkan ekonomi biru. Oleh karena itu, kami mendorong peningkatan kerja sama maritim antarnegara anggota MIKTA. Konektivitas antarnegara kiranya bisa diwujudkan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan industri, termasuk kerja sama industrialisasi kelautan dan perikanan yang diarahkan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Dalam *World Ocean Summit* (WOS) 2017 di Bali tahun lalu, Indonesia mengusulkan akuntabilitas dari berbagai negara dalam memberantas *illegal fishing*. Upaya untuk memberantas *illegal fishing* sangat terkait dengan pertumbuhan industri perikanan dan keberlanjutan dari industri dan sumber daya ikan itu sendiri. Namun Indonesia tidak dapat melakukan hal tersebut secara sepihak. Ketua DPR RI menekankan bahwa Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Indonesia memerlukan penegakan hukum yang tegas, komitmen dan dukungan bersama semua pihak, termasuk negara-negara tetangga di kawasan.

Ketua DPR RI juga mengingatkan bahwa laut dunia kian terancam dari pelbagai aktivitas negatif manusia, mulai dari sampah plastik hingga polusi kimia berbahaya sehingga merusak ekosistem dan keselamatan manusia itu sendiri. Harus ada kepedulian dan kontribusi bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Terkait hal tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan *Our Ocean Conference* (OOC) 2018 di Bali, pada tanggal 29–30 Oktober mendatang. Dengan tema besar “*Our Ocean, Our Legacy*”, Indonesia akan membahas berbagai agenda dan isu kelautan yang terbagi dalam *6 areas of cooperation* yaitu:

- i) *Marine pollution*;
- ii) *Marine Protected Areas (MPA)*;
- iii) *Sustainable fisheries*;
- iv) *Climate-related impacts to the ocean*;
- v) *Sustainable blue economy*; dan
- vi) *Maritime security*.

Oleh karena itu, Indonesia memandang penting agar kiranya negara anggota MIKTA dapat mengirimkan delegasi pada level tertinggi untuk menghadiri pertemuan tersebut, serta memberikan komitmennya untuk perlindungan laut. Indonesia juga mengundang partisipasi seluas mungkin dari para pemangku kepentingan kelautan, termasuk parlemen untuk turut serta memantau konferensi tersebut.

Sebagai penutup, melalui fungsi pengawasannya, parlemen harus mengingatkan dan mendorong pemerintah masing-masing, untuk secara sungguh-sungguh melakukan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ketua DPR RI meyakini bahwa kunci pengelolaan kelautan yang berkelanjutan adalah dengan menggalang kemitraan dan kerja sama antar-negara secara terus-menerus.

Tanggapan Ketua Majelis Nasional Republik Korea (Yang Mulia Mr. Moon Hee-Sang)

Penguatan kapasitas maritim untuk kesejahteraan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang terus meningkat. Namun perusakan ekosistem kelautan akibat pemanfaatan yang berlebihan dari sumber daya kelautan menjadi tantangan terberat yang perlu dipikirkan penanganannya. Kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini merupakan salah satu cara yang terpikirkan oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea.

Pada bulan Juni yang lalu, Sekjen PBB António Guterres menekankan pentingnya kerja sama maritim untuk pencapaian SDGs. PBB selanjutnya menyusun *Call for Actions* yang meminta negara anggota PBB untuk mendukung pelaksanaan SDGs Goal No. 14 mengenai kelautan yang diadopsi pada Sidang Umum PBB. Pada saat negara-negara di dunia mendefinisikan, menetapkan tujuan, dan menyusun rencana pencapaian SDGs Goal No. 14, Republik Korea berupaya memperkuat kapasitas dalam negeri dan kerja sama maritim luar negeri.

Di tingkat nasional, Majelis Nasional Republik Korea menyadari bahwa undang-undang yang ada belum mengatur keseluruhan ruang laut termasuk ZEE dan pengaturan penggunaan sumber daya kelautan belum maksimal. Terakhir, undang-undang tersebut telah diperbaharui dan diberlakukan undang-undang perencanaan dan manajemen ruang laut yang mengatur manajemen wilayah kelautan termasuk wilayah pesisir. Implementasi undang-undang tersebut akan dimulai pada April tahun depan. Undang-undang ini menjadi dasar pengelolaan informasi sumber daya dan informasi kelautan yang selanjutnya menjadi dasar hukum pembentukan sistem manajemen terintegrasi.

Di tingkat internasional, dalam kesempatan kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Korea di tahun 2016, Republik Korea telah menandatangani *MoU* antara Republik Korea dengan Indonesia mengenai kerja sama kelautan. Selanjutnya, pada April tahun depan, Republik Korea akan menjadi tuan rumah komite gabungan pertama untuk kerja sama industri maritim Republik Korea–Indonesia. Komite akan membahas proyek kerja sama termasuk pengembangan pelabuhan dan penanganan limbah kelautan.

Lebih lanjut Ketua Majelis Nasional Republik Korea menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan di bidang maritim bukan saja merupakan upaya satu negara tetapi upaya masyarakat internasional. Kerja sama maritim merupakan satu peta jalan, dan Ketua Majelis Nasional Republik Korea menyampaikan beberapa saran untuk mengembangkan kapasitas dan memajukan kerja sama maritim.

Saran pertama adalah mengurangi limbah laut, menghapuskan aksi ilegal, termasuk *illegal, unreported* dan *unregulated (IUU) fishing*. Limbah laut tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai masalah lokal, tetapi merupakan masalah global dan lintas batas. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan limbah laut memerlukan kerja sama internasional. Saat ini Republik Korea terlibat dalam proyek kerja sama dengan Indonesia untuk investigasi limbah laut di Bali. Proyek ini merupakan salah satu bentuk pertukaran teknologi manajemen limbah laut. Sebelumnya, di tahun lalu, Republik Korea ambil bagian dalam KTT G-20 yang ke-17 dan telah mengadopsi rencana aksi G-20 untuk limbah laut. Berbagai upaya dilakukan untuk secara bersama-sama merespons secara aktif permasalahan limbah laut. Selain itu Republik Korea juga berupaya melarang impor

hasil laut yang ditangkap secara ilegal dan tidak berkelanjutan. Ketua Majelis Nasional Republik Korea merasa bahwa sumber daya dan ekosistem kelautan harus dilindungi dan penangkapan ikan ilegal harus dikurangi,

Saran kedua adalah mencari cara berkelanjutan untuk menggunakan sumber daya maritim dengan menyesuaikan cara penangkapan ikan, termasuk akselerasi penelitian sumber daya maritim. Harus ada kepatuhan terhadap *adequate level of catch* atau jumlah kuota tangkapan yang sudah disyaratkan. Tahun ini Republik Korea menjadi tuan rumah komite ilmiah internasional untuk tuna dan spesies seperti tuna di lautan Pasifik Utara. Pada pertemuan tersebut disepakati pembatasan kuota penangkapan ikan untuk mempreservasi dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan.

Saran berikutnya adalah penguatan kerja sama dengan organisasi internasional. Pada bulan Januari tahun ini Republik Korea menandatangani *MoU* dengan *UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission* (IOC) mengenai pelaksanaan rencana dekade ilmu kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Rencana 10 tahun dari IOC ini bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan merupakan satu proyek eksplorasi dan penelitian internasional yang diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2020. Implementasi dari rencana ini akan dilaksanakan di tahun 2021–2031. Inti dari eksplorasi dan penelitian dalam rencana ini adalah penggunaan berkelanjutan atas sumber daya kelautan dan juga pemantauan lingkungan kelautan serta pengumpulan data.

Pengetahuan mengenai laut tidak hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Ketua Majelis Nasional Republik Korea mengutip perkataan John F. Kennedy yang menekankan pentingnya sumber daya kelautan. Lautan tidak hanya memerlukan perlindungan dari manusia, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk pertumbuhan dan kesejahteraan manusia. Beliau berharap diskusi mendalam mengenai potensi maritim dapat dilakukan di parlemen-parlemen MIKTA dan mengarah pada kerja sama kelautan yang lebih besar untuk pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan untuk semua.

Tanggapan Wakil Ketua Parlemen Turki (Yang Mulia Mr. Mustafa Şentop)

Sumber daya kelautan adalah sumber protein dari 50 persen populasi dunia, Wakil Ketua Parlemen Turki memperkirakan bahwa pendapatan dari laut dapat meningkat dua kali lipat. Komunike Eropa juga mengangkat tentang *blue economy* dengan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan sebagai bagian utama. Masuk dalam *blue economy* adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga ombak, transportasi, boga bahari, pariwisata dan sumber daya mineral, pertambangan dasar laut, teknologi kelautan, perlindungan sumber daya kelautan, serta perencanaan tata ruang kelautan yang juga merupakan bagian dari Komunike Uni Eropa.

Sektor maritim terus diperkenalkan sebagai bentuk energi terbarukan yang dapat meminimalisasi polusi dan limbah dengan tetap berupaya melindungi atau bahkan memulihkan ekosistem keragaman hayati, Upaya pemanfaatan potensi maritim harus juga memperhatikan batasan emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengembangan manajemen sumber daya, dan transisi ekonomi rendah karbon.

Turki memiliki tiga perbatasan laut yang merupakan perairan internal, yaitu Marmara dan Mediterania yang terhubung dengan Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Secara bersama, negara yang saling berbatasan telah berupaya mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di sektor maritim. Solusi tersebut diupayakan untuk membuka peluang ekonomi yang bermanfaat bagi semua.

Seperti telah disampaikan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, SDGs harus menjadi panduan dalam upaya pengelolaan potensi maritim. Turki akan terus mendukung kolaborasi dan akan melakukan segala upaya untuk mencapai sasaran agenda 2030 dari SDGs. Wakil Ketua Parlemen Turki memastikan bahwa Turki akan meneruskan upaya-upaya pengurangan polusi serta sampah plastik dan *IUU fishing* dalam pengelolaan potensi maritim di wilayahnya.

Tanggapan Wakil Presiden Senat Australia (Yang Mulia Ms. Sue Lines)

Australia dan Indonesia adalah mitra maritim alami, karena kedua negara memiliki perbatasan laut terpanjang di dunia. Kedua negara juga telah bekerja sama dan terus berupaya merespons tantangan maritim. Pada Maret tahun ini, kedua negara telah menandatangani rencana aksi maritim yang akan diperluas sampai ke spektrum keamanan maritim dan juga kepentingan perekonomian kedua negara.

Australia menantikan ketuanrumahan Indonesia dalam *Our Ocean Conference* di Bali bulan depan. Ketua DPR RI tadi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, dan walaupun Australia hanya memiliki satu dua pulau, karena posisinya yang bertetangga dengan Indonesia, maka Australia juga terkadang dianggap negara kepulauan.

Australia merupakan negara dagang besar. Keamanan dan kesejahteraan Australia bergantung pada potensi laut. Volume perdagangan Australia sebagian besar bergerak melalui jalur laut. Garis pantai Australia juga sangat panjang, dan tanggung jawab SAR Australia mencakup 53 km², 1/10 dari belahan dunia. Geografi Indonesia telah membentuk konsep kawasan yang disebut IndoPasifik, jalur pelayaran laut tersibuk di dunia di poros Samudra Hindia dan Pasifik,

Kawasan IndoPasifik merupakan rumah dari tiga perekonomian besar. Sembilan dari 10 pelabuhan laut ditemui di IndoPasifik yang menjadikan jalur ini sebagai jalur pelayaran laut tersibuk di dunia. *White Paper* kebijakan luar negeri Australia menekankan pentingnya domain kelautan untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan di Pasifik. Australia sangat berkepentingan dalam meningkatkan ketahanan, keamanan, dan juga kesejahteraan di wilayah Pasifik.

Di domain maritim, Konvensi PPB mengenai hukum kelautan atau UNCLOS merupakan landasan hukum yang mengatur kegiatan maritim di kawasan. Negara-negara di kawasan mengelola dan menyelesaikan sengketa berdasarkan peraturan tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Australia akan terus berupaya untuk memastikan bahwa hukum internasional termasuk UNCLOS dihargai, dihormati, dan dilaksanakan untuk memastikan kebebasan dan perlindungan terhadap pelayaran, penerbangan, dan juga ZEE. Konsultasi Australia dengan Timor Leste terkait dengan perbatasan laut merupakan contoh baik penggunaan UNCLOS dalam penyelesaian sengketa secara memuaskan untuk kedua belah pihak.

Australia juga bernegosiasi di New York, untuk pasal tambahan UNCLOS mengenai pemanfaatan sumber daya kelautan di luar batas wilayah teritorial. Upaya ini penting bagi Australia untuk memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya kelautan. *White Paper* Australia juga memuat upaya untuk memperkuat kerja sama di bidang maritim di forum-forum regional. Oleh karena itu Australia menyambut baik kepemimpinan Indonesia untuk memperkuat kerja sama keamanan maritim di wilayah ASEAN, terutama dalam KTT Asia Timur.

Pernyataan para pimpinan dalam KTT Asia Timur di tahun 2016 menekankan pentingnya penguatan kerja sama maritim dan kesediaan anggota KTT Asia Timur untuk bekerja sama. Australia juga menjadi *co-chair* dalam seminar kerja sama keamanan maritim Australia–ASEAN di Sidney. Inisiatif yang diajukan Australia adalah upaya kontra-terorisme melalui keanggotaan aktif dalam forum negara ASEAN dan juga dukungan terhadap *Pacific Forum* termasuk untuk penanganan *IUU fishing*, dan kejahatan lintas batas negara.

Perkembangan di Semenanjung Korea menunjukkan arti penting penerapan Resolusi DK PBB untuk menghalangi proliferasi senjata pemusnah massal. Australia menyambut baik laporan Komisi PBB mengenai Korea Utara dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Lebih lanjut Australia juga mendorong semua negara di dunia untuk menegakkan pelaksanaan sanksi serta memberikan tekanan ekonomi dan sanksi sosial kepada Korea Utara.

Di awal tahun ini, Australia berinisiatif melakukan pengembangan kapasitas ASEAN dalam bentuk pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan oleh *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC). Australia juga akan melakukan *workshop* penggunaan *port state control* (PSC) untuk penyelesaian sengketa kelautan di Filipina. Selain itu Australia juga mendorong penggunaan teknologi berbiaya rendah untuk mendeteksi kegiatan ilegal dan risiko kegiatan melalui pelatihan terkait pelaksanaan UNCLOS.

Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia, semuanya memiliki perbatasan dengan laut. Apa yang terjadi di garis pantai masing-masing negara, di ZEE, dan juga di area SAR sangat penting untuk keamanan dan kesejahteraan kawasan. Wakil Presiden Senat Australia menyampaikan keinginan untuk terus bekerja sama dalam forum MIKTA untuk memastikan pencapaian tujuan keamanan maritim bersama.

Penutup dari Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Indonesia dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia (± 100.000 km) sangat bergantung pada hasil laut. Periode Kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melihat peran penting kemaritiman dalam menjaga kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Dari berbagai perspektif yang telah disampaikan pimpinan parlemen negara anggota MIKTA dapat ditarik benang merah bahwa memang sumber daya kemaritiman merupakan sumber daya penting bagi MIKTA.

Komentar Terakhir Ketua Majelis Nasional Republik Korea (Yang Mulia Mr. Moon Hee-Sang)

Korea memberikan komentar terakhir dengan kembali menginformasikan bahwa pada tanggal 18 September akan diadakan pertemuan bersejarah ketiga, setelah sebelumnya diadakan pertemuan pertama pada 27 April. KTT membuka peluang untuk mengubah situasi yang ada di Semenanjung Korea, dan pada 14 September akan dibuka kantor perhubungan atau *Inter-Korean Liaison Office*. KTT Korea III akan memainkan peran yang penting dan signifikan dalam pembahasan antara kedua negara Korea dan juga dengan Amerika Serikat. Ketua Majelis Nasional Republik Korea sekali lagi meminta dukungan dan kerja sama pimpinan parlemen MIKTA berkaitan dengan topik yang sangat penting ini.

Tanggapan Ketua DPR RI (Yang Mulia Mr. Bambang Soesatyo)

Indonesia sangat mendukung -100 persen- upaya perwujudan perdamaian dan hubungan yang semakin baik antara Republik Korea dengan Korea Utara. Semoga KTT Korea 18 September 2018 menjadi tonggak sejarah bagi Korea. Dan tentu peserta yang hadir berharap KTT Korea memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan kesejahteraan di seluruh dunia.

Closing Session

Penutupan dimulai pukul 15:00, di Istana Tampaksiring, pada 16 September 2018. Ketua DPR RI menyampaikan bahwa para pemimpin parlemen dari Republik Indonesia, Republik Korea, Turki, Australia, dan perwakilan Meksiko telah bertemu di Bali, Indonesia untuk *The 4th MIKTA Speakers' Consultation*. Pertemuan kali ini berlangsung ketika peran parlemen semakin krusial dari sebelumnya. Parlemen berperan membentuk dinamika politik nasional baru yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan global.

Sebagai kemitraan inovatif baru, MIKTA dibentuk untuk memajukan aksi-aksi kolaboratif di tengah cepatnya perubahan dinamika global. Anggota MIKTA adalah negara demokratis dengan kepentingan yang sama dalam memperkuat tata kelola global. Dewasa ini terjadi peningkatan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global, ketidakpastian ekonomi, tantangan sosial, kultural, dan degradasi lingkungan. Tantangan global ini membuat MIKTA perlu mengambil upaya kolektif yang lebih kuat melalui kemitraan yang inklusif.

Tema menyeluruh dari konsultasi tahun ini adalah "*Creating Peace and Prosperity: The Role of Parliament*" untuk menggarisbawahi peran parlemen dalam memastikan kebijakan dan aksi yang perlu diambil untuk perdamaian dan kesejahteraan rakyat.

The 4th MIKTA Speakers' Consultation menyambut beragam inisiatif MIKTA untuk ekonomi yang lebih inklusif di bawah koordinasi Indonesia dalam bentuk *MIKTA Expert Meeting on Inclusive Digital Economy Hub* dan *MIKTA Start-Up Fest*. Perhelatan

berikutnya yang juga dinantikan adalah *World Conference of Creative Economy* pada November 2018 di Indonesia.

Diskusi MIKTA juga menyoroti kurangnya kapasitas arsitektur global terutama PBB dan DK PBB dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia. Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB tahun 2019–2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tujuan MIKTA dalam memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia menekankan pentingnya membangun sinergi antara pembangunan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sebagai alat memajukan perdamaian dan kesejahteraan global. Kerja sama antarparlemen adalah fundamental untuk mendukung sinergi tersebut termasuk melalui penyelenggaraan *the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development*.

Pertemuan WPFSD menggarisbawahi empat komitmen antara lain: meningkatkan upaya peningkatan pemahaman terkait SDGs antarparlemen; membentuk mekanisme yang diperlukan dalam bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai SDGs berdasarkan fungsi-fungsi parlemen dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan; menindaklanjuti hasil dari WPFSD melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya; dan melanjutkan pertemuan rutin WPFSD sebagai forum global anggota parlemen dalam pencapaian SDGs.

Forum konsultasi juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban konflik tetapi juga melibatkan mereka sebagai agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan.

Pertemuan hari ini juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik termasuk melalui peraturan keterlibatan perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian serta proses pembangunan perdamaian dan meningkatkan kepemimpinan mereka di lingkaran dan proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan diskusi di sesi terakhir, Forum berkeyakinan bahwa laut adalah kunci pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tetapi laut saat ini mendapatkan tekanan luar biasa sebagai imbas dari aktivitas manusia. Para pimpinan parlemen negara anggota MIKTA menekankan pentingnya kerja sama kemaritiman antarnegara MIKTA untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan mencapai pemanfaatan berkelanjutan laut dan juga kontribusi dalam pencapaian agenda 2030 SDGs.

Indonesia melihat pentingnya penguatan jejaring antarparlemen untuk memajukan kerja sama maritim yang lebih luas termasuk melalui inisiatif terbaru DPR RI yakni *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* yang baru-baru ini dilaksanakan. Indonesia juga menyampaikan akan menjadi tuan rumah pertemuan kelima *Our Ocean Conference* pada 29–30 Oktober mendatang, dan mengundang seluruh anggota negara MIKTA untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut.

DPR RI berterima kasih pada seluruh pimpinan parlemen negara anggota MIKTA atas kontribusi dan partisipasi aktif dalam dua hari penyelenggaraan Forum. Diharapkan kerja sama ke depan akan terus berlanjut termasuk pada 2019 mendatang ketika Meksiko melanjutkan kepemimpinan MIKTA.

Konferensi Pers

Pada kesempatan Konferensi Pers, Ketua DPR RI dengan didampingi pimpinan parlemen negara anggota MIKTA menyampaikan bahwa selama dua hari, yaitu pada 15 dan 16 September 2018, DPR RI telah menyelenggarakan *The 4th MIKTA Speakers' Consultation* yang dihadiri oleh:

- Yang Mulia Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Mr. Moon Hee-Sang;
- Yang Mulia Wakil Ketua Parlemen Turki, Mr. Mustafa Sentop;
- Yang Mulia Wakil Presiden Senat Australia, Ms. Sue Lines; serta
- Yang Mulia Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Mr. Armando Gonzalo Alvarez Reina mewakili Parlemen Meksiko yang berhalangan hadir dan memantau jalannya persidangan dengan sabar.

Penyelenggaraan *The 4th MIKTA Speakers' Consultation* dan kepemimpinan Indonesia dalam MIKTA pada tahun 2018 ini telah mendapatkan apresiasi yang positif dari seluruh delegasi yang hadir. *The 4th MIKTA Speakers' Consultation* di Bali mengusung tema "*Creating Peace and Prosperity: the Role of Parliament*". Tema ini dipilih karena isu-isu perdamaian dan kesejahteraan masih menjadi prioritas utama dalam masyarakat internasional.

Forum terbagi ke dalam empat sesi yang membahas isu-isu yang relevan dengan tema utama sidang MIKTA, yaitu pertama *Creative Industries to Support Inclusive Economic Growth* yang dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea. Sesi kedua, *Maintaining Peace and Security: Empowering the United Nations* dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Turki. Sesi ketiga membahas *the Role of Women in Peace and Security* dipimpin oleh Wakil Presiden Senat Australia. Dan sesi keempat membahas *Maritime Cooperation for Sustainable Growth and Prosperity* yang dipimpin oleh Ketua DPR RI.

MIKTA menyambut baik pertumbuhan pesat industri ekonomi kreatif dan mendorong berbagai upaya perbaikannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam isu *Maintaining Peace and Security*, MIKTA memiliki perhatian yang sama terhadap pentingnya upaya peningkatan peran PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Terkait proses reformasi di tubuh PBB, khususnya DK, perlu terus dilakukan. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019–2020, memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tujuan MIKTA dalam upaya penguatan peran PBB khususnya DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

MIKTA juga menggarisbawahi pentingnya kerangka legislatif yang lebih baik untuk melindungi perempuan dari kekerasan konflik dan sekaligus peningkatan partisipasi secara aktif di dalam kepemimpinan perempuan sebagai agen perdamaian dalam pembangunan perdamaian dan resolusi konflik.

Dalam isu *Maritime Cooperation for Sustainable Growth and Prosperity*, MIKTA menekankan pentingnya kerja sama maritim antarnegara MIKTA yang ditujukan untuk memajukan maritim dan pentingnya pemanfaatan sumber daya maritim yang berkelanjutan untuk pencapaian agenda pembangunan 2030.